

BAB II

DINAMIKA UMAT ISLAM HINDIA BELANDA AWAL ABAD KE-20 M

A. Dinamika Sosial-Politik Hindia Belanda

Bagi Hindia Belanda (Indonesia), permulaan abad ke-20 M lazim dikenal dengan istilah masa/zaman pergerakan nasional.¹ Perjuangan pergerakan² nasional di Hindia Belanda dilatarbelakangi oleh kebijakan Politik Etis atau Politik Balas Budi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda yang menyatakan, bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Kebijakan politik tersebut membuat perubahan yang cukup besar bagi bangsa Indonesia.³

Salah satu kebijakan Politik Etis⁴ yaitu edukasi, membawa perubahan yang cukup besar bagi bangsa Indonesia. Berangkat dari kebijakan edukasi ini muncul

¹ Dalam istilah yang lain, masa pergerakan nasional hanyalah bagian dari abad Nasionalisme yang ditandai dengan kemunculan kesadaran berbangsa. Nor Huda, *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), h. 105. Taufik Abdullah mengistilahkan awal abad ke-20 M di Indonesia sebagai dasawarsa ideologi. Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1987), h. 15.

² Pergerakan sendiri merupakan suatu istilah yang memiliki makna dan kedudukan tersendiri dalam sejarah politik nasional khususnya di masa sebelum Proklamasi Kemerdekaan. Pergerakan dapat diartikan sebagai satu tahap konkret dalam perjuangan kebangsaan yang berbeda dengan tahap sebelumnya maupun tahap yang akan datang. Tahap kongkret disini dapat dimaksud dengan tahap kebangkitan suatu masyarakat terjajah melawan penjajah dalam bentuk dan pola perjuangan yang membedakannya dengan perjuangan sebelum dan sesudahnya. Tribuana Said, *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1988), h. 3. Hal lain yang dapat dipahami mengenai pergerakan, bahwasanya pergerakan memiliki artian yang sangat luas. Istilah pergerakan dapat berarti gerakan yang menuju perbaikan derajat hidup tidak hanya seluruhnya, namun juga dapat sebagian saja. Istilah pergerakan juga tidak hanya berkaitan dengan kepentingan bangsa Indonesia saja, namun juga berkaitan dengan gerakan yang hanya sebagian diperuntukkan dari bangsa Indonesia. AK Pringgodigdo, *Sedjarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Rakyat, 1950), h. 5.

³ Sartono Kartodirdjo, dkk., *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975), h. 34-35.

⁴ Politik Etis berkembang pada awal abad ke-20 M dalam pelaksanaan politik kolonial Belanda di Hindia Belanda. Politik ini berpedoman pada peningkatan kemajuan rakyat pribumi (Indonesia) dan menjadi politik haluan utama atau *ethisce politik*. Ide politik ini berasal dari Van Deventer, seorang etikus yang menulis artikel *een eerschuld* atau hutang budi dan dimuat dalam majalah *De Gide*. Ide politik ini didasari oleh pandangannya terhadap politik penghisapan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, tetapi pemerintah kolonial sendiri yang telah abai terhadap kewajibannya terhadap rakyat jajahan dalam bidang kesejahteraan dan pendidikan. Menurut Van Deventer, sudah seharusnya pemerintah kolonial Belanda mengubah watak

para tokoh terpelajar Indonesia sebagai elit modern.⁵ Politik etis di bidang edukasi, pendek kata, mengenalkan masyarakat pribumi terhadap pendidikan modern Barat (Belanda). Hal ini menjadi cikal-bakal terciptanya komunitas terdidik/intelektual/inteligensia/cendekiawan⁶ Indonesia dalam beragam bentuk seperti inteligensia Kristen, inteligensia Islam, inteligensia komunis, inteligensia sosialis, dan sebagainya. Komunitas-komunitas, itulah yang membentuk strata sosial baru dalam struktur masyarakat.⁷

politiknya terhadap Hindia Belanda (Indonesia) agar lebih banyak memperhatikan kemajuan rakyat jajahan. Cahyo Budi Utomo, *Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia: Dari Kebangkitan Hingga Kemerdekaan*, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995), h. 13. Sudah terkenal, bahwa politik etis menggunakan tiga sila sebagai slogannya, yaitu Irigasi, Edukasi, dan Emigrasi. Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: dari Kolonialisme sampai Nasionalisme jilid 2*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), h. 32. Juga terdapat diskursus tentang sampai kapan kebijakan politik etis ini berakhir. Pun begitu, para ahli menyepakati bahwa kebijakan politik etis ini adalah kebijakan yang gagal (diterapkan). Kebijakan politik etis pada akhirnya juga menjadi *boomerang* bagi pemerintah kolonial. Lihat, Jan S. Aritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), h. 150-152.

⁵ Istilah pertama dalam bahasa Indonesia (Melayu) yang mengindikasikan lahirnya elit-terpelajar Hindia Belanda adalah *bangsawan pikiran* yang mulai muncul dalam ruang publik pada dekade pertama abad ke-20 M. Istilah itu merupakan sebuah kode untuk menamai generasi baru dari orang-orang Hindia Belanda yang terdidik secara modern dan ikut serta dalam gerakan menuju *kemadjoean*, berlawanan dengan istilah *bangsawan oesoel* yang dikaitkan dengan kebangsawanan yang lama. Istilah *bangsawan pikiran* digunakan baik untuk menunjuk pada individu “intelektual” maupun pada entitas kolektif “inteligensia” Hindia Belanda. Untuk menegaskan mulai hadirnya komunitas baru seperti yang dibayangkan, maka kolektivitas *bangsawan pikiran* itu kemudian diberi nama *kaoem moeda*, sementara kolektivitas *bangsawan oesoel* diberi nama *kaoem toea* atau *kaoem koeno*. Pada tahun 1910-an, penentangan para anggota inteligensia terhadap bangsawan tua memunculkan sebuah upaya untuk memisahkan kata *pikiran* dari kata *bangsawan*, karena istilah *bangsawan* secara implisit berarti mengagung-agungkan hak istimewa dari bangsawan lama. Maka, kemudian muncullah istilah *kaoem terpeladjar*, *pemoeda peladjar* atau *jong* (dalam bahasa Belanda). Istilah-istilah ini digunakan untuk merujuk kepada sebuah entitas kolektif dari orang-orang yang terdidik secara modern. Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad Ke-20*, (Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2012), h. 33-34.

⁶ Perlu dipahami bahwa ada perbedaan pandangan terkait penggunaan istilah terdidik, intelektual, inteligensia, dan cendekiawan. Lebih lengkap lihat, Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 6-16. Peneliti dalam tesis ini cenderung menggunakan istilah kaum terdidik atau terpelajar, dan meminjam pula istilah intelektual.

⁷ Yudi Latif sendiri menggunakan istilah inteligensia untuk menandai kaum terdidik-pandai, terutama bagi mereka yang pernah mengenyam pola pendidikan modern Barat semasa kolonialisme Belanda. Mereka inilah yang membentuk kelas sosial baru yang dipadankan pula dengan kaum elit-terdidik atau elit-terpelajar. *Ibid*, 16. Dalam upaya berbagai komunitas ini untuk memperbanyak pengikutnya dan meluaskan pengaruhnya di masyarakat, mereka melakukannya dengan jalan menggabungkan diri dengan kelompok-kelompok status (*status groups*) yang telah mapan (yaitu kelompok kelompok solidaritas kultural). Karena situasi demikian, inteligensia Indonesia menjadi sebuah strata sosial yang retak sehingga sulit untuk diidentifikasi sebagai sebuah strata sosial tersendiri yang menyatu. Meski demikian, mereka tetap menunjukkan kesamaan-kesamaan dalam keistimewaan sosial (*social privilege*), bahasa, kebiasaan, latar pendidikan dan orientasi pekerjaan. Dengan kata lain, inteligensia Indonesia merefleksikan suatu ekspresi kolektif dalam arti “suatu kesamaan identitas dalam perbedaan” (*identity in difference*) dan “keberagaman dalam kebersamaan identitas” (*difference in identity*). Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa...*, h. 32.

Diterapkannya Politik Etis di awal abad ke- 20 M sering dianggap sebagai awal pangkal kondisi yang membukakan kesadaran berbangsa bagi rakyat Indonesia, tetapi pelaksanaannya tidak terlepas dari kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Politik Etis sebenarnya merupakan bentuk penjajahan kebudayaan yang halus sekali. Program edukasi itu sendiri sebenarnya merupakan pelaksanaan dari Politik Asosiasi yang berarti penggantian kebudayaan asli tanah jajahan dengan kebudayaan penjajah. Walaupun menyimpang dari tujuan semula, beberapa pelaksanaan dari Politik Etis telah membawa pengaruh yang baik. Misalnya, dengan didirikannya sekolah-sekolah untuk golongan pribumi. Tujuannya adalah untuk memperoleh tenaga baru pegawai rendah yang bersedia digaji lebih murah dari pada tenaga bangsa-bangsa Belanda. Banyaknya penduduk pribumi yang bersekolah telah menghasilkan kaum cerdik pandai dikalangan penduduk pribumi. Kaum cerdik pandai inilah yang memelopori kesadaran kebangsaan, yaitu suatu kesadaran tentang perlunya persatuan dan kesatuan bangsa.

Meskipun demikian, kaum cerdik/elit-terpelajar ini terfragmentasi menjadi dua bagian, yaitu pelajar yang peduli dengan nasib bangsa, dan pelajar yang tidak peduli dengan kondisi bangsa pada saat itu. Kaum elit-terpelajar yang peduli dengan nasib bangsanya inilah yang kemudian membentuk suatu pergerakan yang sering disebut dengan pergerakan nasional. Pergerakan ini memiliki dua sifat, yaitu kooperatif dan non kooperatif.⁸

⁸ Taufik Abdullah, *Nasionalisme dan Sejarah*, (Bandung: Satya Historika, 2001), h. 26.

Kaum elit-terpelajar yang peduli dengan nasib bangsa Indonesia, membuat suatu gebrakan yang baru bagi perjuangan bangsa Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia yang dahulu memakai senjata, berubah pola yang kemudian dari pihak kaum pelajar ini melakukan perjuangan melalui pemikiran.⁹ Munculnya pola gerakan perlawanan baru ini dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor yang secara umum bisa dibagi menjadi dua, yakni faktor internal dan eksternal. Munculnya kaum intelektual di Hindia Belanda akibat dari pemberlakuan politik etis merupakan faktor internal penting yang mengakibatkan munculnya gerakan perlawanan dengan menggunakan organisasi. Hal ini pada akhirnya juga didukung dengan berbagai akumulasi perasaan rakyat yang distimulus oleh berbagai hal, salah satunya adalah persamaan bahasa, dan (termasuk) agama.¹⁰ Perjuangan di

⁹ Pola perjuangan di masa pergerakan nasional memiliki ciri berupa perjuangan yang lebih terorganisir namun longgar (dalam hal ini pola perjuangannya tidak terstruktur), lihat, Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa...*, h. 224., mempunyai asas dan tujuan yang jelas, bertujuan jangka panjang, serta memiliki ideologi khas yang berujung pada pembentukan konsep negara (-bangsa). Cahyo Budi Utomo, *Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia...*, h. 23. Disisi yang lain, zaman pergerakan nasional di Hindia Belanda juga menandai digunakannya sarana pembentukan organisasi yang (biasanya) memiliki media massa/pers sebagai sarana penyebaran gagasan perjuangan nasional. Untuk itu, banyak di antara para aktivis (organisasi) pergerakan nasional, terutama kaum terpelajar yang menerbitkan surat kabar, majalah, dan media cetak lain. Media cetak tersebut mereka gunakan untuk menyalurkan pemikiran dan membentuk opini publik mengenai perjuangan kemerdekaan, meskipun penduduk pribumi yang melek huruf pada saat itu sangat sedikit. Pergerakan pemikiran kaum terpelajar ini cenderung radikal dan sering kali beroposisi dengan pemerintah. Sartono Kartodirdjo, dkk, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V*, h. 63. Antara pergerakan nasional dan pers (pribumi) sendiri dapat diibaratkan sebagai kembar siam yang keduanya hidup berdampingan secara simbiotik. Meskipun para tokoh pergerakan dapat mengadakan perkumpulan atau rapat besar sebagai cara berkomunikasi, namun hal itu masih terbatas. Sebaliknya, forum yang tersedia oleh media massa atau pers adalah kontinyu dan intensif, sehingga aspirasi mereka dapat terkomunikasikan lebih efektif. Pers telah membuat revolusi komunikasi, antara lain mengubah pola komunikasi tradisional yang terutama lisan sifatnya menjadi tertulis. Pers juga menciptakan sistem komunikasi terbuka, dimana informasi dapat diperoleh oleh golongan sosial manapun. Meskipun komunikasi lewat pers bersifat satu arah, pers mempunyai potensi membangkitkan kesadaran kolektif, antara lain mengenai kepentingan umum, seperti keamanan, kesejahteraan, kemasyarakatan, ketatanegaraan dan lain sebagainya. Saat itu pers sangat membantu tumbuhnya massa kritis dalam masyarakat, kesadaran kolektif, dan solidaritas umum. Dengan kata lain pers mempunyai peranan penting untuk menjalankan pendidikan politik bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu dunia pers mendapat perhatian yang besar dari golongan pergerakan. Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru...*, h. 116.

¹⁰ Cahyo Budi Utomo, *Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia...*, h. 41-47. Dalam konteks kesamaan agama, dalam hal ini Islam, masa pergerakan nasional juga diwarnai dengan paham Pan-Islam yang identik dengan Turki Utsmani dan telah berlangsung satu abad sebelumnya. Pan-Islam kemudian dianggap sebagai salah satu faktor penting pembentuk kesadaran nasional di Hindia Belanda atau sebagai cikal bakal nasionalisme Indonesia. Ulasan lengkap, dapat lihat, Anthony Reid, *Nineteenth Century Pan-Islam in Indonesia and Malaysia*, dalam *The Journal of Asian Studies*, Vol. 26, No. 2, Feb. 1967, h. 267-283.

luar kawasan Hindia Belanda semisal, kemenangan perang bangsa Jepang terhadap Rusia, perjuangan revolusi di Tiongkok yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat Sen, revolusi Filipina yang dipimpin Jose Rizal, pergerakan perjuangan Mahatma Gandhi di India, gerakan Turki Muda, dan sebagainya, juga menjadi faktor eksternal yang turut menyebabkan timbulnya pergerakan Indonesia modern.¹¹

Berbagai faktor ini diterjemahkan dalam bentuk perlawanan pergerakan melalui pembentukan organisasi pergerakan. Timbulnya organisasi pergerakan nasional Indonesia tidak secara mendadak. Namun, melalui proses yang cukup lama dan dipengaruhi oleh berbagai peristiwa yang mendahuluinya. Baik peristiwa yang ada di dalam negeri maupun yang terjadi diluar negeri. Akan tetapi titik berat yang sangat menentukan adalah kejadian-kejadian yang terjadi di dalam negeri. Adapun peristiwa yang terjadi diluar negeri hanyalah mempercepat proses timbulnya perjuangan dalam pergerakan nasional.

Pembentukan organisasi pergerakan disadari betul oleh para aktivis terpelajar Indonesia, sebagai media bantu perjuangan bangsa dalam mencapai cita-cita kemerdekaan dari pemerintah kolonial. Mereka menyadari bahwa pemerintah kolonial yang memiliki organisasi yang rapi dan kuat tidak mungkin dihadapi dengan cara tradisional sebagaimana perlawanan rakyat sebelumnya. Inilah letak arti penting organisasi modern bagi perjuangan kebangsaan. Melalui organisasi pergerakan ini pula, berbagai gagasan perjuangan kebangsaan dipopulerkan. Berbagai gagasan ini bermuara pada satu gagasan berupa pendirian

Lihat pula, Nikki R. Keddie, *Pan-Islam as Proto-Nationalism*, dalam *The Journal of Modern History*, Vol. 41, No. 1, Mar. 1969, h. 17-28.

¹¹ AK Pringgogido, *Sedjarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, h. 7-8.

negara (nasional) bangsa.¹² Perjuangan melalui organisasi telah menjadi wahana perjuangan dalam upaya melepaskan diri dari cengkraman penjajah Belanda dan menjadi pembeda dari perjuangan masa sebelumnya yang hanya mengandalkan kekuatan senjata.

Tanggal 20 Mei 1908 merupakan titik tolak, awal mula perjuangan melalui organisasi di Hindia Belanda waktu itu. Budi Utomo¹³ kemudian lahir sebagai organisasi pergerakan modern. Tidak lama setelah berdirinya BU, muncul pula organisasi-organisasi yang lebih aktif dan penting. Beberapa di antaranya bersifat keagamaan,¹⁴ kebudayaan, pendidikan, dan beberapa lagi bersifat politik,¹⁵ dan

¹² Cahyo Budi Utomo, *Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia...*, h. 23.

¹³ Budi Utomo (dapat disingkat BU) didirikan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta oleh para pelajar STOVIA yang digagas pertama kali oleh dr. Wahidin Sudirohusodo dan dr. Sutomo. Dr. Sutomo kemudian menjadi ketua BU yang pertama. BU sendiri didirikan dengan latar belakang pertama kali berupa kampanye kerjasama antar para priyayi di pulau Jawa yang digagas pertama kali oleh dr. Wahidin Sudirohusodo. Pada awal perjalanan kampanyenya, tidak ada hasil yang signifikan walaupun terdapat hasil, seperti yang ada di Jawa Tengah berupa pembentukan "Dana Belajar". Dalam perjalanan kampanyenya juga, dr. Wahidin bertemu dengan dr. Sutomo, pelajar dari STOVIA yang kemudian pertemuan tersebut meluaskan cita-cita dr. Wahidin yang dari sebatas dana belajar, menjadi lebih luas lagi. Sebagai realisasinya maka dibentuklah organisasi BU. Marwati Djoenod Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (ed.), *Sejarah Nasional Indonesia V, Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Republik Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 335. BU diawal perjuangannya lebih memfokuskan diri pada bidang pendidikan dan kebudayaan yang diwujudkan dengan cara mendirikan banyak sekolah, sehingga BU dapat dipandang sebagai gerakan nasionalisme kultural. BU belum dapat menunjukkan sikap perjuangannya dalam bidang politik kala itu mengingat adanya larangan tegas untuk perkumpulan politik. Aktivitas Perjuangan BU pada awalnya juga masih samar-samar, yaitu kemajuan bagi Hindia. Anggotanya pun masih terbatas. Tetapi munculnya organisasi ini telah menarik khalayak ramai. Karena itu dalam rentang waktu yang tidak lama setelah berdirinya, yakni antara bulan Mei hingga Oktober 1908 telah berdiri cabang-cabang BU di Bandung, Bogor, Magelang, Surabaya, Probolinggo, dan Yogyakarta. Cahyo Budi Utomo, *Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia...*, h.52-54. BU sendiri lebih aktif bergerak di kalangan para priyayi. MC Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* (terj: Dharmono Hardjowidjono), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), h. 251.

¹⁴ Sarekat Islam merupakan salah satu contoh organisasi pergerakan yang bersifat keagamaan. Sarekat Islam (dapat disingkat SI) didirikan pada 11 November 1912. Ketua pertama SI yang ada di Solo adalah H. Samanhudi. SI tumbuh dari organisasi yang mendahuluinya yakni Sarekat Dagang Islam yang didirikan tahun 1911. Sarekat Dagang Islam diketuai oleh R.M. Tirta Adisuryo. Ada pendapat lain mengenai awal mula berdirinya SI, yakni pada tahun 1906 dan Sarekat Dagang Islam satu tahun sebelumnya. Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1982), h. 115. SI sendiri didirikan dengan latar belakang antara lain adanya halangan perdagangan Indonesia dari pedagang Tionghoa, penyebaran agama Kristen, serta berbagai adat di kerajaan-kerajaan Jawa yang dirasa telah tidak sesuai. AK Pringgogidgo, *Sedjarah Pergerakan Rakjat Indonesia*, h. 14-15. SI muncul dengan pola pergerakan yang berbeda dengan gerakan-gerakan sebelumnya, terutama BU. SI merupakan total, yang artinya tidak terbatas pada satu orientasi tujuan, tetapi mencakup berbagai bidang aktivitas, yaitu ekonomi, sosial, politik, dan kultural. Tambahan pula didalam gerakan itu, agama Islam berfungsi sebagai ideologi. Hal ini menjadikan SI sebagai gerakan revivalisme, yaitu kehidupan kembali kepercayaan dengan jiwa atau semangat yang berkobar-kobar. Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: dari Kolonialisme sampai*

ada pula yang bersifat keduanya. Organisasi-organisasi ini kemudian bergerak di kalangan masyarakat bawah, dan untuk yang pertama kalinya terjalin hubungan antara rakyat biasa dan para elit-terpelajar.¹⁶ Secara ideologis politis, identitas mereka tidak semua sama, secara garis besar mereka terfragmentasi ke dalam tiga kelompok yaitu Islam, nasionalis/sekular, dan komunis.¹⁷

Nasionalisme jilid 2, h. 107. Dengan terkumpulnya berbagai aspek perjuangan dalam SI, maka SI juga disebut gerakan nasionalis-demokratis-religius-ekonomis. AK Pringgodigdo, *Sedjarah Pergerakan Rakjat Indonesia*, h. 15. Tidak hanya bercorak keislaman (dan gerakan Kristen yang diwakili pemerintah kolonial), pada dekade kedua dari abad ke-20 M ini muncul perhimpunan-perhimpunan bercorak keagamaan baru yang secara aktif merekrut para anggotanya dari segmen-segmen masyarakat kota yang tercerabut dari akarnya, mulai dari orang-orang Indo yang sedang mencari dukungan spiritual bagi proyek nasionalisme multikulturalnya, hingga para bangsawan Jawa yang menemukan medium baru untuk mengartikulasikan mistisisme Jawa-nya, dan juga para anggota inteligensia yang mengalami alienasi, seperti *Thesofische Vereeniging* (Perhimpunan Teosofi) dan Ahmadiyah. Lihat, Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa...*, h. 196-198. Namun organisasi bercorak keagamaan Islam pertama yang muncul di Hindia Belanda adalah Jam'iat Khaer.

¹⁵ Organisasi pergerakan yang memiliki identitas politik yang jelas pasca berdirinya BU adalah *Indische Partij*. *Indische Partij* (dapat disingkat IP) didirikan berawal dari gagasan Douwes Dekker atau nama lainnya yakni Danudirdja Setyabudhi, seorang Indo (peranakan Belanda). Ia melihat adanya keganjilan dan diskriminasi perlakuan pemerintah kolonial terhadap keturunan Belanda murni dengan keturunan campuran. Namun begitu pandangannya diperluas lebih jauh, bahwa rakyat pribumi berhak menentukan nasib mereka sendiri serta menyadarkan rakyat akan bahaya eksploitasi kolonial. Berangkat dari pemikiran ini maka Douwes Dekker memberikan solusi perlawanan berupa pendirian organisasi atau *partij* yang dapat menampung segala lapisan masyarakat. Berawal dari gagasan ini kemudian Douwes Dekker berkeliling dan mendapat dukungan dari Tjipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat yang kemudian mereka disebut sebagai tiga serangkai. Mereka pada akhirnya mewujudkan cita-cita perjuangan perlawanan dengan mendirikan *Indische Partij* pada 25 Desember 1912. Marwati Djoenod Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (ed.), *Sejarah Nasional Indonesia V...*, h. 350. Melihat dari aktivitas pergerakannya, sejak awal kemunculannya IP memang telah menunjukkan sikap politik radikalnya terhadap pemerintah kolonial. Tak heran kemudian pemerintah kolonial mengambil sikap tegas terhadap IP. Itulah sebabnya IP tak berumur panjang karena pemimpinnya dijatuhi hukuman buang pada Agustus 1913. Walaupun tak berumur panjang, IP telah memberikan kata "Merdeka" secara terbuka dan konsep kebangsaan yang dikembangkannya telah berpengaruh terhadap perjuangan tokoh-tokoh perjuangan lain. Mulai saat itu, gerakan politik yang langsung menyerang pemerintah kolonial berhembus semakin kencang. Pecahnya Perang Dunia I juga semakin membuat pemerintah kolonial selalu berhati-hati terhadap segala macam gerakan politik yang muncul di Hindia Belanda (Indonesia), walaupun secara fisik peperangan tidak terjadi. Cahyo Budi Utomo, *Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia...*, h. 75-76.

¹⁶ Terdapat perdebatan yang menyatakan bahwa tanggal 20 Mei saat ini diperingati sebagai hari kebangkitan nasional. Perdebatan muncul mengenai siapa yang lebih layak disebut sebagai pelopor pergerakan, apakah diantara BU, SI, dan IP sesungguhnya. Perdebatan didasarkan pada siapa yang paling dahulu berdiri, gagasan kebangsaan yang diserukan, hingga peranan mereka masing-masing. Hal ini masih menjadi hal yang belum disepakati secara bulat. Peneliti sendiri menyadari tiap organisasi memiliki ciri khas dan sumbangsihnya tersendiri terhadap bangsa, sehingga tidak menjadi masalah yang substansial jika siapa pun yang terpilih diantara ketiganya yang lebih pantas menjadi pelopor pergerakan karena sejatinya ketiga organisasi ini adalah pelopor pergerakan. Dalam berbagai historiografi yang membahas mengenai sejarah pergerakan nasional, kemunculan tiga organisasi tersebut, disebutkan sebagai pelopor pergerakan Pasca itu kemudian disebut sebagai masa radikal pergerakan nasional yang dimulai awal tahun 1920-an. Lihat, Marwati Djoenod Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (ed.), *Sejarah Nasional Indonesia V...*, h. 335-353.

¹⁷ Ulasan lengkap tentang perkembangan organisasi pada zaman pergerakan nasional, dapat lihat Cahyo Budi Utomo, *Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia: Dari Kebangkitan hingga Kemerdekaan*, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995).

Dengan kata lain masa pergerakan nasional yang terjadi pada awal abad ke- 20 M dapat diartikan sebagai pergerakan di seluruh wilayah Indonesia. Berasal dari berbagai kelompok, suku, budaya dan agama yang terhimpun dalam organisasi pergerakan dan bertujuan untuk memajukan bangsa dengan tujuan akhir merdeka dengan meliputi semua aspek kehidupan berupa semangat untuk memberdayakan ekonomi, pendidikan, sosial, politik dan budaya yang diwujudkan dalam bentuk perjuangan organisasi pergerakan nasional yang moderat atau radikal yang mau bekerjasama (kooperatif) atau tidak bekerjasama (non kooperatif) dengan pemerintah Hindia Belanda.

Secara khusus, umat Islam (masyarakat beragama Islam) Hindia Belanda kala itu juga terfragmentasi dalam beragam organisasi dengan corak yang berbeda. Wadah bagi umat Islam dapat diwakili dengan keberadaan organisasi Islam, yang memang menyatakan diri membawa Islam sebagai gagasan utama serta sebagai identitasnya, walau dalam beberapa batasan tertentu. Keberadaan organisasi Islam kala itu, semisal Sarekat Islam, Muhammadiyah, Persis, Nahdhatul Ulama, dan beberapa organisasi Islam lain menjadi bukti keberadaan organisasi sebagai representasi dari umat Islam.

Pada masa ini juga, umat Islam juga dihadapkan pada masuknya gagasan-gagasan lain, seperti berkembangnya ajaran komunisme di Hindia Belanda yang menjadikan umat Islam mengalami persentuhan gagasan secara politis. Walau kemudian, ajaran komunisme (dianggap) sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang banyak dianut oleh masyarakat, namun ternyata gagasan ini mampu memengaruhi beberapa golongan dari masyarakat Islam di Hindia Belanda untuk

kemudian dijadikan sebagai sikap politik perjuangannya. Selain komunisme, umat Islam Hindia Belanda juga menerima konsepsi nasional yang sekular. Nasionalisme bangsa ini menghendaki persatuan Indonesia sebagai *nation-state* tanpa sekat-sekat penghalang termasuk agama. Gagasan Nasionalisme ini kemudian mengalami perkembangan dengan memunculkan berbagai dinamika yang pada akhirnya juga turut membentuk respon dan posisi umat Islam dalam percaturan politik kala itu. Selain itu, umat Islam juga mengalami dinamika berupa pertikaian internal antar umat Islam. Penyebabnya adalah perbedaan pandangan tentang praktik keagamaan terutama antar umat Islam yang ada dalam golongan pembaharu dan tradisional.

B. Wacana Kebangkitan dan Pembaharuan Islam di Hindia Belanda

Bangkitnya paham kebangsaan Indonesia pada dekade-dekade pertama abad ke-20 M, menandai bermunculannya gerakan-gerakan masyarakat pribumi yang berjuang menentang kolonialisme Belanda dan menuntut kemerdekaan atas tanah Hindia Belanda (Indonesia). Dalam konteks sejarah Islam di Indonesia, abad ke-20 M juga digambarkan sebagai sejarah gerakan yang ditandai dengan kemunculan organisasi-organisasi pergerakan (Islam) yang belum pernah ada pada masa sebelumnya.

Namun demikian, seabad sebelumnya, berbagai gerakan keagamaan (berdasar) Islam -yang diwakili elit agama- belum sepenuhnya menggunakan Islam sebagai ideologi politik untuk mencapai tujuan dan menata kekuasaan politik. Mereka masih memandang pemerintah kolonial dengan pendekatan

tekstual, syariah atau *fiqh* dan akidah atau tauhid. Akan tetapi pandangan dan sikap politik elit agama yang pernah berhaji ke Mekah pada paruh pertama abad ke-20 M berbeda dengan ulama abad sebelumnya. Mereka lebih menekankan pada pendekatan kontekstual. Sejalan dengan itu, di kalangan masyarakat muslim mulai timbul gerakan-gerakan pembaharuan yang bertujuan mempersatukan kekuatan muslim untuk melawan hegemoni dari kolonialisme pemerintah Belanda.

Berbagai gerakan pembaharuan banyak dimotori oleh para ulama haji yang telah pulang ke tanah air. Gerakan pembaharuan yang dimunculkan oleh sebagian ulama haji ini melahirkan hubungan kuat antara haji dengan organisasi politik Islam. Organisasi politik Islam merupakan kelompok yang bergerak atau berkepentingan serta terlibat dalam proses politik dan secara aktif berperan dalam menentukan nasib bangsa tersebut berdasarkan nilai-nilai Islam. Sebuah organisasi terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Gerakan-gerakan ini mempunyai misi untuk mengubah suatu pola pemikiran menjadi sebuah tindakan.

Jika dibandingkan dengan beberapa kawasan lain yang juga mengalami fase penjajahan, maka di Indonesia pertumbuhan organisasi-organisasi Islam jauh lebih meluas dan dengan jumlah yang juga lebih banyak. Muncul pula elit-ulama-terdidik Islam yang mengemukakan beragam pemikiran baru tentang dunia Islam. Walaupun demikian, jika dibandingkan dengan nama para elit-ulama-pemikir dari

belahan dunia Islam lain, maka nama-nama elit-ulama-pemikir dari Hindia Belanda tidak terlalu besar pengaruhnya.¹⁸

Ketidakpopuleran para elit Islam Hindia Belanda dibandingkan dengan para elit pemikir lain dikarenakan tidak adanya ide-ide baru yang memang muncul dari hasil pemikiran mereka secara langsung. Para elit Islam Hindia Belanda di masa pergerakan nasional lebih sebagai pentransmisi, penerjemah, dan pelaksana gagasan-gagasan baru mengenai Islam. Walaupun demikian, di tingkat lokal peranan mereka lebih dirasakan dan memiliki arti yang lebih bagi umat Islam di Hindia Belanda jika dibandingkan dengan elit-ulama-pemikir Islam dari luar Hindia Belanda.

Dalam konteks ini, Islam memainkan peran yang amat menentukan bagi perkembangan pemikiran kebangsaan Indonesia. Islam berfungsi sebagai mata rantai yang menyatukan rasa persatuan nasional menentang kolonialisme Belanda. Agama Islam bukan saja merupakan mata rantai yang mengikat tali persatuan, melainkan bahkan merupakan simbol kesamaan nasib (*ingroup*) menentang pendatang asing dan penindas yang berasal dari agama lain. Islam merupakan sarana yang (paling) jelas baik untuk membangun persatuan nasional maupun untuk membedakan masyarakat Indonesia dari elit penjajah Belanda. Karena multikulturalnya Indonesia, lantaran terdiri dari berbagai tradisi historis, linguistik, kultural dan bentuk geografis yang berbeda, maka satu-satunya ikatan universal

¹⁸ Wardini Akhmad, *Kongres Al-Islam 1922-1941: Satu Telaah Tentang Integrasi dan Disintegrasi Organisasi-Organisasi Islam di Indonesia dalam Perkembangan Pergerakan Nasional*, (Jakarta: Disertasi Program Doktor IAIN Syarif Hidayatullah, 1989), h. 37-38.

yang tersedia, di luar kekuasaan kolonial, adalah Islam.¹⁹ Alhasil ikatan antara Islam dan masyarakat Hindia Belanda mewujud dalam beragam bentuk dan berpuncak pada bentuk institusi sosial-politik-keagamaan. Meskipun demikian, ikatan ini bukan sesuatu yang muncul dengan tiba-tiba namun telah dipupuk semenjak (paling tidak) tiga abad sebelumnya.²⁰

Jauh sebelumnya di Nusantara telah terbentuk institusi politik Islam yang cukup tangguh. Pada masa ini umat Islam mempunyai kemerdekaan yang luas dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang diambilnya, termasuk soal paham Islam yang dianut. Namun, kemerdekaan politik ini mulai terganggu ketika intervensi bangsa Eropa terhadap institusi-institusi Islam setempat. Jatuhnya institusi politik Islam ke tangan pemerintahan Belanda sangat memengaruhi kondisi sosial umat Islam. Mereka kini, hidup dalam bayang-bayang kebijakan pemerintahan kolonial.

¹⁹ Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (terj: Ihsan Ali-Fauzi dan Rudy Harisyah Alam), (Jakarta: Paramadina, 2009), h. 69. Nilai-nilai egalitarianisme Islam disebut pula memberi andil bagi bangkitnya kesadaran (proto) nasional. Lihat, Yudi Latif, *Negara Paripurna...*, h. 64-65.

²⁰ Secara khusus, ikatan Islam di Indonesia dalam menolak kolonialisme (anti-kolonial) berpuncak di awal abad ke-19 M, setelah di abad-abad sebelumnya penentangan terhadap kolonialisme ini berlangsung. Hal ini sebenarnya bermula dari sikap bangsa Eropa (dalam hal ini Portugis) yang menyerang terlebih dahulu, -setelah sebelumnya disambut dengan tangan terbuka-, Malaka yang menjadi simbol institusi Islam. Pada perkembangannya kemudian, persaingan ini berkembang menjadi Islam melawan Barat. Tak hanya diawali dari persaingan di bidang perdagangan, namun juga turut meluas menjadi kesemua bidang. Islam kemudian memicu munculnya kesadaran akan kebebasan dari penjajahan. Lihat, Anthony Reid, *Nineteenth Century Pan-Islam in Indonesia and Malaysia*, h. 267-269. Lihat pula, Jeff Lee, *The Failure of Political Islam in Indonesia: A Historical Narrative*, dalam *Stanford Journal of East Asian Affairs*, Vol. 4, No. 1, Winter 2004, h. 88. Perlawanan terhadap kolonialisme ini pula yang nantinya melahirkan gagasan tentang pembaharuan/kebangkitan Islam, Lihat pula, Michael Francis Laffan, *Islamic Nationhood and Colonial Indonesia: The Umma Below The Wind*, (London: Routledge Curzon, 2003), h. 27-31. Perlu pula dipahami bahwa, masyarakat Muslim, paling tidak pada periode ini, tak ada pembedaan yang tegas antara ranah agama dan politik. Karena itu, wacana agama dan kepentingan-kepentingan dalam komunitas-komunitas agama bisa mempenetrasi ruang publik, sedangkan institusi-institusi dan forum-forum agama bisa juga berfungsi sebagai ruang publik. Selain itu, di Hindia Belanda, tempat dimana lebih dari 90% penduduknya adalah kaum Muslim, institusi-institusi dan forum-forum Islam secara teoritis terbuka buat sebagian besar penduduk Hindia. Selain itu, di Hindia, dimana formasi kelasnya kurang begitu tegas atau terkonsolidasikan jika dibandingkan dengan di Eropa, ruang publiknya diramaikan oleh suara-suara kelompok-kelompok solidaritas kultural. Lihat, Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa...*, h.180.

Pemerintah kolonial Belanda sendiri pada dasarnya belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai Islam, dimana ketika mewarisi Hindia Belanda dari VOC, pemerintah kolonial telah dihadapkan pada fakta bahwa sebagian besar penduduk Hindia Belanda telah beragama Islam.²¹ Pemerintah kolonial masih belum berani untuk mencampuri masalah ini secara langsung dikarenakan masih kuatnya memori akan pemberontakan orang-orang Islam yang fanatik. Selain itu, pemerintah kolonial juga masih percaya diri akan keberhasilan kebijakan kristenisasi yang dijalankan.²² Namun begitu, kebijakan tentang Islam ini ternyata tidak seperti yang terlihat, dimana pemerintah kolonial justru dalam praktiknya memperlihatkan upaya-upaya yang keras, terutama sekali dalam masalah haji.²³

Namun, silih bergantinya bangsa Eropa yang datang dan kemudian memerintah, mereka mempunyai kebijakan yang hampir sama terhadap Islam. Pada umumnya mereka selalu berusaha menghambat lajunya perkembangan Islam. Mereka selalu mempersempit ruang gerak Islam dalam berbagai dimensinya, seperti misal Raffles yang mempunyai pandangan bahwa para kyai di Jawa mempunyai kekuatan dalam menggalang massa untuk pemerintah kolonial. Hal ini mengingat tingginya kedudukan para kyai itu di mata rakyat. Oleh karena itu, Raffles mempunyai kesimpulan bahwa, ternyata, para kyai ini aktif dalam

²¹ Jumlah umat Islam di Hindia Belanda di abad ke-19 M tidak bisa diketahui dengan pasti. Pulau Jawa, sebagai pulau yang memiliki penduduk paling banyak, di abad ke-19 M juga memiliki banyak pemeluk agama Islam walau tidak diketahui pula jumlah pastinya. Pun begitu, sebagai gambaran umum dapat dikatakan bahwa di beberapa wilayah di pulau Jawa terdapat beberapa penguasa lokal -yang dalam hal ini setingkat Bupati- yang menolak dilakukannya kristenisasi di kawasannya. Lebih jauh lihat, Ibnu Qoyim Isma'il, *Kiai Penghulu Jawa: Peranannya di Masa Kolonial*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 32.

²² Husnul Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 9-10.

²³ Para haji dianggap pemerintah kolonial dapat menyebarkan paham-paham Islam politik yang pada ujungnya akan membahayakan eksistensi pemerintah kolonial sendiri. Atas dasar itulah maka, politik Islam Hindia Belanda pada mulanya menjadi sangat identik dengan haji. Lebih jauh, lihat, M. Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), h. 263.

berbagai pemberontakan. Kaum ulama di Minangkabau pun mempunyai peran politis yang strategis sehingga keberadaannya sangat mengkhawatirkan pemerintahan kolonial. Kebijakan yang hampir sama juga diterapkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.²⁴

Kebijakan pemerintah kolonial yang keras terhadap gerakan keagamaan (Islam) sedikit berkurang dengan munculnya analisis Snouck Hurgronje. Dikatakan, dalam masalah agama pemerintah kolonial bersikap netral, misal dalam ibadah haji ditingkatkan pelayanannya. Terhadap Islam politik, kolonial selalu mencurigai dan meneliti dimana sumbernya, terutama yang dipengaruhi gagasan Pan-Islam (dalam konteks ini adalah gerakan kebangkitan Islam).²⁵

Walau kebijakan pemerintah kolonial terhadap Islam secara umum telah diberikan acuan garis besarnya, namun secara teknis operasional kebijakan ini akan dikembalikan pada Gubernur Jenderal yang berkuasa ada di Hindia Belanda. Di titik ini, kebijakan mengenai Islam akan sangat tergantung pada sosok Gubernur Jenderal yang berkuasa, seperti kebijakan terhadap munculnya organisasi Islam.

²⁴ Nor Huda, *Perkembangan Institusi Sosial-Politik Islam Indonesia Sampai Awal Abad XX*, dalam *Jurnal ADDIN*, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015, h. 374-375.

²⁵ Sebelum kedatangan Snouck Hurgronje di Hindia Belanda, kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah kolonial Belanda terhadap Islam di Indonesia tidaklah memiliki arah yang jelas. Hal ini disebabkan miskinnya pengetahuan Kolonial Belanda tentang Islam dan Indonesia, atau mungkin buta sama sekali. Pada masa itu kebijaksanaan Kolonial Belanda terhadap Islam di Indonesia, secara tradisional dibentuk oleh kombinasi yang kontradiktif antara ketakutan dan pengharapan yang berlebih-lebihan. Snouck Hurgronje kemudian membuat formulasi politik Kolonial Belanda terhadap Islam di Hindia Belanda yang mencakup tiga kebijaksanaan pokok yang dalam hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Pertama, memecah-belah kekuatan Islam di Hindia Belanda melalui politik *divide et empera* dengan sikap netral terhadap agama. Kedua, mengikis habis pengaruh Islam dengan memajukan kebudayaan Barat melalui pendidikan dan pengajaran, menuju terciptanya asosiasi dan Indonesianisasi. Ketiga, menumpas tegas munculnya doktrin dan pergerakan politik Islam, terutama yang dipengaruhi oleh ide-ide Pan-Islam. Lebih lengkap lihat, Effendi, *Politik Kolonial Belanda Terhadap Islam di Indonesia dalam Perspektif Sejarah (Studi Pemikiran Snouck Hurgronje)*, dalam *Jurnal TAPIS*, Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2012, h. 91-102.

Pada masa pergerakan nasional, Islam merupakan agama yang banyak dianut oleh masyarakat Hindia Belanda dan menjadi agama yang dianaktirikan karena berbagai larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kolonial. Islam menjadi sebuah pendorong bagi didirikannya organisasi yang menyatukan berbagai lapisan masyarakat. Berbagai organisasi Islam telah muncul pada masa awal abad ke-20 walaupun terbuka bagi masyarakat muslim Hindia Belanda secara keseluruhan. Pertumbuhan gerakan politik yang dilakukan oleh umat Islam Hindia Belanda menunjukan sebuah kebangkitan dan pembaruan dari kekuatan yang telah lama mengalami berbagai kekalahan. .

Wacana kebangkitan Islam (*Islamic Resurgence*) merupakan suatu gerakan yang mengacu pada pandangan dari umat Islam bahwa Islam menjadi penting kembali, karena Islam dikaitkan dengan perjalanan masa lalunya yang gemilang. Kegemilangan itu tampak selama tujuh abad pertama sejak lahirnya Islam hingga masa lalu tersebut memengaruhi pemikiran umat Islam. Islam dianggap sebagai satu-satunya kekuatan alternatif memperbaiki kondisi umat yang sedang mengalami keterpurukan, sehingga wacana kebangkitan Islam lebih didasarkan pada pemahaman bahwa Islam dapat menjadi senjata (alternatif) dalam melawan penjajahan dan kolonialisme bangsa Eropa dalam rangka membangkitkan kembali kejayaan Islam.

Sementara itu, wacana pembaharuan Islam²⁶ lebih merujuk pada pembaharuan untuk merekonstruksi pemahaman terhadap aspek-aspek dalam

²⁶ Pembaharuan Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dalam bahasa Arab, gerakan pembaharuan Islam disebut *tajdid*, secara harfiah *tajdid* berarti pembaharuan dan pelakunya disebut *mujaddid*. Dari kata *tajdid* ini selanjutnya muncul istilah-istilah lain yang pada dasarnya lebih

ajaran Islam, seperti tasawuf, kalam, syariah, dan sebagainya. Pada mulanya wacana pembaharuan Islam identik pengaruh gerakan pemurnian (purifikasi) di Jazirah Arab, India, dan sebagainya. Keinginan untuk melakukan pembaharuan itu muncul ketika banyak kalangan terpelajar Islam kembali dari *Haramayn*. Mereka berusaha menghadirkan Islam dalam bentuk yang sesuai dengan perkembangan zaman. Karena, menurut mereka, hanya dengan cara demikian umat Islam dapat keluar dari kolonialisme Barat, keluar dari kemiskinan dan kebodohan serta dapat mengembalikan citra Islam yang sebenarnya. Hal ini juga didukung dengan adanya kontak politik dan intelektual dengan Barat, dimana pada waktu itu, baik secara politis maupun secara intelektual, Islam telah mengalami kemunduran, sedangkan Barat dianggap telah maju dan modern. Kondisi sosiologis seperti itu menyebabkan kaum pribumi (elit terpelajar) muslim merasa perlu untuk melakukan pembaharuan.

Wacana pembaharuan serta kebangkitan Islam kemudian menjadi populer di awal abad ke-20 M. Hal ini disadari oleh umat Islam Hindia Belanda bahwa mereka tidak akan mungkin dapat berkompetisi dengan kekuatan-kekuatan yang menentang dari kolonialisme Belanda, penetrasi Kristen, serta tuntutan untuk maju di kawasan Asia. Wacana kebangkitan dan pembaharuan Islam dianggap dapat mengatasi masalah ini, selain dari adanya anggapan bahwa perjuangan

merupakan bentuk *tajdid*. Di antaranya adalah *reformasi*, *purifikasi*, *modernisme*, *rasionalisasi*, *kontekstualisasi*, *revivalisme* dan sebagainya. Istilah yang beragam itu mengindikasikan bahwa hal itu terdapat variasi entah pada aspek metodologi, doktrin maupun solusi, dalam gerakan *tajdid* yang muncul di dunia Islam. Lebih lengkap lihat, Fauzi, *Pembaharuan Islam: Memahami Makna, Landasan, dan Substansi Metode*, dalam *Jurnal Ibdā'*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2004, h. 1-3. Dalam beberapa konteks yang lain, antara wacana kebangkitan dan wacana pembaharuan sering disamakan satu sama lainnya. Subbab ini lebih menyoroti antara wacana kebangkitan dan pembaharuan yang sering dianggap sama di awal abad ke-20 M, namun perlu pula untuk mendudukan konsepsi kedua wacana ini. Selain itu, dalam konteks (per)gerakan, gerakan sosial-keagamaan pada satu abad sebelumnya, yakni abad ke-19 M juga memiliki sebutan yang beragam. Di antaranya adalah mesianisme, millenarianisme, nativisme, profetisme, dan revivalisme. Lebih jauh lihat, Nor Huda, *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, h. 141.

Islam secara tradisional dianggap tidak memberikan pengaruh berarti.²⁷ Wacana ini juga melahirkan istilah yang mendikotomikan umat Islam Hindia Belanda, yaitu kaum modernis dan kaum tradisional, termasuk pula kaum nasionalis-netral agama.

Lewat jiwa zamannya maka gagasan pembaharuan ini diterjemahkan dalam perjuangan melalui bentuk organisasi pergerakan (yang efektif dan efisien)²⁸ serta propaganda melalui media massa.²⁹ Diawali dari lahirnya Sarekat Islam (SI) yang merupakan titik yang menentukan (*watershed*) dalam perkembangan ide kebangsaan-Islam sebagai cikal bakal nasionalisme Indonesia (proto nasionalisme). Untuk pertama kalinya, kata Islam secara eksplisit digunakan sebagai nama sebuah perhimpunan, yang mengindikasikan bahwa Islam sekarang telah diaktifkan sebagai basis identitas kolektif dan sebagai sebuah ideologi bagi gerakan-gerakan (proto) nasionalis.³⁰ Kemunculan SI ini disikapi

²⁷ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, h. 37. Secara historis, wacana kebangkitan dan pembaharuan Islam telah dimulai sebelum abad ke-20 M yang diawali dengan kepulangan para ulama Nusantara/Indonesia ke tanah Hindia Belanda. gagasan pembaharuan dan kebangkitan ini diilhami dari kawasan Timur Tengah (terutama kawasan Arab Saudi dan Mesir, termasuk pula Turki), dan juga oleh gerakan purifikasi Islam yang diusung gerakan Wahabi. Sugijanto Padmo, *Gerakan Pembaharuan Islam Indonesia dari Masa ke Masa: Sebuah Pengantar*, dalam *Jurnal Humaniora*, Vol. 19, No. 2, Juni 2007, h. 153-154. Gerakan pembaharuan Islam (dalam hal ini purifikasi Islam) pertama kali di Hindia Belanda dimulai di daerah Sumatra Barat lewat gerakan pendidikan dan sosial di satu pihak dan gerakan politik di pihak yang lain. Ulasan ringkas dapat dilihat, Nor Huda, *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, h.105-107. Lihat pula, Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, h. 37-42. Wacana pembaharuan Islam yang direspon oleh umat Islam Hindia Belanda dapat pula dipahami sebagai upaya melawan proyek sekularisasi yang diusung oleh pemerintah kolonial Belanda.

²⁸ Sugijanto Padmo, *Gerakan Pembaharuan Islam Indonesia dari Masa ke Masa: Sebuah Pengantar*, h. 153.

²⁹ Media massa yang menyuarakan gagasan Islam secara lugas adalah *al-Imam* yang terbit di Singapura. *Al-Imam* dianggap sebagai koran modern pertama yang menyajikan analisis mendalam mengenai agama, sosial, dan ekonomi. MC Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, h. 257. Media massa lainnya, terutama yang berbahasa Melayu dan terbit di kawasan Hindia Belanda mulai bermunculan. Dapat dilihat, Nor Huda, *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, h. 106. Lihat pula, Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa...*, h. 181-190. Hal ini menandakan betapa gagasan pembaharuan Islam -termasuk juga gagasan lain- yang berkembang di masa itu memerlukan media massa sebagai sarana propaganda.

³⁰ *Ibid*, 206.

dengan sangat hati-hati oleh pemerintah kolonial Belanda.³¹ Pada perkembangan selanjutnya SI menjadi basis dan contoh bagi organisasi-organisasi pergerakan lain untuk juga dapat muncul dengan ciri khas mereka masing-masing, baik sebagai organisasi Islam tradisional maupun organisasi Islam pembaru (modern).³²

Artikulasi dari wacana pembaharuan dan kebangkitan Islam ini sendiri dapat dikatakan berbeda. Hal ini lebih dikarenakan adanya perbedaan konsep dalam memahami (terutama) wacana pembaharuan Islam. Walaupun demikian, perlu dipahami pula bahwa awal mula kebangkitan dan pembaharuan kekuatan Islam dalam bentuk yang terorganisir ini pada awalnya didasarkan pada adanya kesamaan kepentingan, yaitu adanya persaingan dan perselisihan ekonomi dengan masyarakat Cina di Hindia Belanda yang didasarkan pada kepentingan persaingan dagang. Pertumbuhan kekuatan Islam memang harus dilihat dengan munculnya Sarekat Islam yang diawali dari organisasi Sarekat Dagang Islam yang terbentuk untuk membendung kekuatan ekonomi monopoli golongan Cina.

Artikulasi dari wacana pembaharuan Islam selanjutnya dapat dilihat melalui dua konsep yaitu modernisme Islam dan reformisme Islam. Reformisme Islam merupakan proyek historis ulama yang dimulai pada abad ke-17 M dalam

³¹ Sarekat Islam diawal pendirian disikapi dengan hati-hati oleh Gubernur Jendral Idenburg dengan memberikan izin yang tidak terpusat dan untuk alasan kontrol dan tanggung jawab yang lebih mudah. Namun begitu pada perkembangan selanjutnya, analisa Snouck Hurgronje terhadap pemisahan Islam dan politik ternyata tidak berjalan di tubuh SI. Atas dasar ini pula, orang-orang Belanda kemudian menimpakan kesalahan ini pada Idenburg dengan mengatakan bahwa SI adalah “salah Idenburg”. MC Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, h. 253. Kemunculan beragam organisasi Islam bercorak tradisional dan modern pada akhirnya disikapi pemerintah kolonial dengan cermat. Penyikapan ini ditunjukkan dengan diberikannya izin pendirian organisasi pergerakan. Pun begitu, kadar penyikapan ini berbeda, dimana organisasi tradisional disikapi dengan lebih lunak dibandingkan dengan organisasi modern. Alasan utamanya adalah kesediaan organisasi tradisional dalam menerima *status quo* politik yang ada. Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, h. 335-336.

³² Golongan tradisionalis juga diidentifikasi dengan istilah Kaum Tua dan golongan modern dengan istilah Kaum Muda. Lebih lengkap dapat lihat, Nor Huda, *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, h. 107-116.

usaha untuk menata kembali umat Islam dan memperbaharui perilaku individu. Proyek historis ini didasarkan pada gagasan pemurnian kepercayaan dan praktik Islam dengan kembali kepada sumber yang otentik, yaitu Al-qu'ran dan Sunnah, serta memiliki kecenderungan kuat untuk menolak kebudayaan Barat. Di sisi lain, modernisme Islam merupakan proyek dari generasi Islam baru yang terpengaruh Barat untuk menyesuaikan diri dengan peradaban modern, namun dengan tetap mempertahankan kesetiaan terhadap kebudayaan Islam. Dengan kata lain, modernisme Islam merupakan sebuah titik tengah (*interstitial space*) antara Islamisme dan sekularisme, yang mungkin saja akan bergerak kembali ke arah Islamisme atau bergerak ke arah sekularisme atau tetap berada dalam posisi moderat di antara kedua titik ekstrem itu. Lebih jauh, wacana kebangkitan dan pembaharuan Islam ini kemudian terwujud pula dalam beragam bentuk -dan nama- yang terpolarisasi dan diartikularisasikan menjadi dua bidang, yaitu bidang sosial-budaya-pendidikan dan bidang sosial politik.³³

³³ Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa...*, h. 123-125. Kemunculan organisasi pergerakan yang dalam bahasa sosiologi disebut dengan gerakan sosial Islam (disingkat GSI) merupakan manifestasi dari panggilan untuk terlibat secara aktif dalam proyek kemanusiaan untuk mentransformasi kehidupan sosial masyarakat menjadi lebih berkualitas, lebih beradab dan merefleksikan nilai-nilai profetik Islam. Sejarah panjang gerakan sosial di berbagai belahan dunia umumnya hadir untuk menyikapi keterpurukan umat Islam, misalnya kemunculan Ikhwanul Muslimin di Mesir yang merupakan respons atas runtuhnya khilafah Turki Utsmani, kemunculan Hizbut Tahrir di Palestina juga dipandang sebagai respons terhadap ekspansi Zionis dan Barat yang begitu kuat ke jantung umat Islam, hal yang sama juga dialami oleh gerakan sosial di Pakistan, hadir untuk merespons peluang politik yang tersedia pasca berpisah dari India. GSI juga muncul di belahan benua Asia dan Afrika dalam rangkaian transmisi ideologi pembaharuan Islam, terutama dalam wujud revivalisme Islam dan modernisasi Islam yang kemudian diikuti dengan menguatnya ideologi Wahabbisme dan Salafisme. GSI bertujuan untuk mereformasi sistem sosial dan sistem politik agar sesuai dengan nilai-nilai etik Islam. GSI tersebut bersinergi dengan meningkatnya jumlah kaum terpelajar di kalangan muslim, khususnya di negara-negara yang memiliki umat Islam mayoritas seperti halnya Indonesia. Munculnya GSI awal abad ke-20 di Hindia Belanda sendiri adalah sebuah konsekuensi logis atas meningkatnya jumlah kaum terpelajar. Munculnya Sarekat Dagang Islam (SDI) 1905 sebagai embrio GSI yang disusul dengan berdirinya Sarekat Islam tahun 1912 (SI dianggap sebagai kelanjutan dari SDI) dan Muhammadiyah pada tahun 1912 merupakan respons atas kondisi internal umat Islam yang nyaris jatuh serta penetrasi pihak luar melalui kolonialisme dan imperialisme Barat. Untuk visi yang sama, lebih dari satu dekade kemudian, berdiri Persatuan Islam (Persis) pada 1923 di Bandung dan Nahdatul Ulama (NU) pada 1926 di Surabaya juga dideklarasikan. Kemunculan kelompok sosial Islam ini dianggap sebagai kebangkitan kelompok sarungan yang mengadaptasikan konsep-konsep Islam yang bersifat eksklusif dengan pemikiran modern yang bersifat rasional dan fungsional. Melalui kemunculan GSI tersebut dapat dipahami bahwa gerakan sosial mengalami

Polarisasi kedua bidang ini turut pula menandai munculnya identitas polarisasi organisasi di tubuh umat Islam yaitu organisasi Islam tradisional dan organisasi Islam modernis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wacana pembaharuan (Islam) yang menyebabkan lahirnya organisasi keagamaan dimana pada mulanya (masih) bersifat keagamaan tetapi seiring dengan kondisi masyarakat pada saat itu menjelma menjadi organisasi sosial, pendidikan, dan berpuncak pada kegiatan politik yang menuntut kemerdekaan Indonesia.

C. Polarisasi Umat Islam Hindia Belanda

Kondisi umat Islam Hindia Belanda di awal abad ke-20 M telah mengalami polarisasi menjadi golongan tradisional dan golongan modern,³⁴ termasuk pula golongan nasionalis-netral agama.³⁵ Pengelompokan/tipologi berupa polarisasi ini menjadi penting dalam penelitian ini, terutama untuk mengidentifikasi siapakah “umat Islam” Hindia Belanda di awal abad ke-20 M. Dalam konteks penelitian ini, polarisasi ini bertujuan untuk memudahkan dalam memahami dan menjelaskan struktur fenomena pergerakan pemikiran keagamaan

eskalasi dalam situasi politik yang tidak stabil (terjadi distorsi identitas, krisis sosial, krisis politik) termasuk di dalamnya berkembangnya konflik dalam suatu negara sebagai akibat dari pemberontakan dan gerakan teror yang hadir dalam situasi politik yang berubah. Lihat, Syarifuddin Jurdi, *Gerakan Sosial Islam: Kemunculan, Eskalasi, Pembentukan Blok Politik dan Tipologi Artikulasi Gerakan*, dalam *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2013, h. 1-2.

³⁴ Tipologi dua kelompok ini -Islam tradisional dan Islam modern-, dalam kajian tentang Islam di Indonesia diperkenalkan oleh Deliar Noer dalam karyanya “Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942”. Dalam karya ini, Deliar Noer secara tegas membuat semacam *watertight distinction* antara Islam modernis yang diwakili oleh Muhammadiyah, Persis, dan lain-lain, dengan Islam tradisi yang diwakili NU dan organisasi semacamnya. Namun begitu, tipologi sebagaimana diperkenalkan oleh Deliar Noer tersebut bukan merupakan sesuatu yang baru. Sebab tipologi sebagaimana disebutkan merupakan pinjaman dari sarjana-sarjana sebelumnya. Tipologi ini merupakan pinjaman dari sarjana-sarjana yang lebih dulu melakukan kajian-kajian terhadap perkembangan pemikiran dan gerakan Islam pada masa moderen, khususnya di Timur Tengah atau di Anak Benua India. Lebih jauh lihat, Mohammad Nor Ichwan, “Islam Tradisionalis dan Modernis: Telaah Historiografis atas Tipologi Masyarakat Islam Indonesia”, dalam *Makalah Diskusi Forum RaSAIL (Ranah Ilmu-Ilmu Sosial Agama dan Interdisipliner)*, Semarang, 24 Juni 2012.

³⁵ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, h. 235.

dan tidak bermaksud untuk menyingkirkan variasi bentuk lainnya dari gerakan pemikiran keagamaan yang cukup kompleks.³⁶

Pun begitu, untuk masa sekarang tipologi ini sudah dirasa kurang tepat dan membingungkan, terutama sekali antara terma Islam tradisional dan Islam modern. Dikatakan kurang tepat karena pola pemikiran kedua kelompok tersebut sekarang sudah mengalami perubahan. Artinya, kelompok yang sering di cap sebagai tradisionalis sekarang ini justru lebih akomodatif dan responsif ketimbang kelompok yang disebut sebagai modernis atau reformis.

Hal ini telah disinggung sebelumnya, dimana sejak akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, wacana kebangkitan dan pembaharuan Islam melalui gerakan “modernisme Islam” membawa perubahan sangat cepat. Modernisme Islam ini mengakibatkan kelompok “Islam tradisional” melakukan konsolidasi demi mempertahankan tradisi. Hal ini dilakukan melalui lembaga pendidikan tradisional, seperti pesantren dan organisasi gerakan. Kelompok Islam tradisional mulai memperkuat kembali pilar-pilar utama tradisionalisme Islam untuk mempertahankan tradisinya.³⁷

Islam tradisional tumbuh dan berkembang secara alamiah mengikuti tradisi dalam kehidupan masyarakat nusantara. Dalam konteks ini Islam

³⁶ Lihat, Tim Penulis, *Ensiklopedia Islam Indonesia Jilid II*, (Jakarta: Djambatan, 2002), h. 584.

³⁷ Diantara yang isu yang menjadi diskursus antara kelompok Islam tradisional dan modern adalah perbedaan *furu'iyah* dalam masalah mazhab fikih. Sekalipun umat Islam Indonesia mengakui mazhab apapun, terutama dalam hal fikih, namun sebagian besar umat Islam Indonesia mempraktikkan Mazhab Syafi'i, mazhab yang menjadi identitas yang paling mudah dikenali dari golongan tradisional. Sementara itu golongan pembaharu datang membawa pemahaman mazhab baru. Pada umumnya golongan ini banyak mempraktikkan fikih Mazhab Hambali meskipun doktrin yang populer pada golongan ini adalah “tidak bermazhab” dan “kembali kepada Al-qur'an dan as-Sunnah”. Perdebatan mengenai keharusan dan ketidakharusan bermazhab inilah yang cukup sering menjadi perbincangan di tokoh golongan pembaharu dan tradisional. Dalam hal fikih ini pula, di kalangan golongan pembaharu dipopulerkan terma *bid'ah* untuk menunjukan ajaran-ajaran (fikih dan lainnya) yang dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip Al-qur'an dan As-Sunnah. Tiar Anwar Bachtiar, *Lajur-lajur Pemikiran: Kilasan Pergulatan Intelektual Islam Indonesia*, (Depok: Komunitas NuuN, 2011), h. 21-22.

tradisional ingin mensinergikan antara teks dan konteks dalam agama Islam, agar Islam dapat berjalan beriringan dengan adat istiadat masyarakat. Mengingat budaya masyarakat pribumi begitu kompleks dalam kehidupan masyarakat nusantara maka Islam tradisional tumbuh berkembang pesat dalam tatanan kehidupan masyarakat di tingkat infrastruktur maupun suprastruktur. Maka jelas bahwa golongan Islam tradisional bersikeras untuk mengukuhkan pertentangan antara tradisi dan modernisme dalam bentuk rivalitas maupun kompetisi.

Kelompok/golongan (Islam) tradisional diidentifikasi sebagai kelompok Islam yang masih mempertahankan tradisi sebagai bagian dari aktivitas keagamaan. Umat Islam Hindia Belanda yang teridentifikasi dalam golongan ini terwakili dalam berbagai organisasi dan yang identik adalah melalui organisasi Nahdhatul Ulama (NU) dan berkembang di kawasan pedesaan.³⁸ Kemunculan kelompok Islam tradisional merupakan respon langsung dari modernisme Islam yang kian ekspansif yang dijawab dengan pengalaman tradisi dari para kyai

³⁸ Nahdhatul Ulama (NU) adalah organisasi sosial keagamaan yang berhaluan Ahli Sunnah wal-Jamaah (Aswaja). Organisasi ini didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 (16 Rajab 1334 H) oleh K.H. Hasyim Asy'ari beserta para tokoh ulama tradisional dan usahawan di Jawa Timur. Berdirinya NU diawali dengan lahirnya Nahdhatul Tujjar (1918) yang muncul sebagai lambang gerakan ekonomi pedesaan, disusul dengan munculnya Taswirul Afkar (1922) sebagai gerakan keilmuan dan kebudayaan, dan Nahdhatul Wathon (1924) sebagai gerakan politik dalam bentuk pendidikan. Tidak hanya NU, berbagai organisasi tarekat, seperti Qodiriyah-Naqshabandiyah yang muncul di Hindia Belanda di awal abad ke-20 M adalah contoh organisasi Islam tradisional. Ulasan lengkap lihat, Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, h. 235-254. Dalam perkembangan lebih lanjut, muncul pula beragam organisasi, seperti Jamaah Tabligh yang mengasosiasikan diri dengan terma Islam tradisional. Harus dibedakan antara istilah Islam tradisional dan organisasi Islam tradisional. Ciri-ciri Islam tradisional sendiri antara lain, eksklusif, kurang dapat membedakan antar hal-hal yang bersifat ajaran dengan yang non ajaran, berorientasi kebelakang, cenderung tekstualis-literalis, cenderung kurang menghargai waktu, cenderung bersifat jabariyah dan teosentris, yaitu sikap pasrah, kurang menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi modern, serta jumud dan statis. Ciri organisasi Islam tradisional antara lain, mengikuti secara ketat tradisi Rasulullah saw dan Ijma' ulama' yang ditransmisikan secara turtun-temurun serta rujukan kepada kitab/karya karangan ulama pengikut imam Syafi'i dalam fatwa hukum Islam yang dirumuskan. Lebih jauh lihat, Abuddin Nata, *Peta keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*, (Bandung: Rajawali, 2003), h. 142-146. Abudin Nata sendiri telah menginventaris sedikitnya ada 12 tipologi pemikiran Islam di Indonesia, yaitu Islam Fundamentalisme, Teologis-Normatif, Eksklusif, Rasional, Transformatif, Aktual, Kontekstual, Esoteris, Tradisionalis, Modernis, Kultural, dan Inklusif-pluralis.

tradisional.³⁹ Dalam konteks gerakan/organisasi, golongan tradisional adalah mereka yang menolak wacana pembaharuan dalam beberapa isu -jadi tidak semua- dan mempertahankan tradisi pada kondisi budaya tertentu dan menganggapnya masih menjadi bagian dari ajaran agama. Selain itu, juga menekankan konsep tertutupnya pintu ijtihad, tasawuf, dan *taqlid* terhadap suatu mazhab.⁴⁰

Kelompok/golongan (Islam) modern (sering pula disebut golongan reformis) pertama kali diidentifikasi sebagai kelompok yang melakukan protes terhadap kekuasaan adat yang tidak memberikan ruang pada mereka untuk bergerak.⁴¹ Umat Islam Hindia Belanda yang teridentifikasi dalam golongan ini terwakili dalam berbagai organisasi dan yang identik adalah melalui Sarekat Islam dan Muhammadiyah.⁴² Golongan Islam modern ini kemudian banyak berkembang di kawasan perkotaan.⁴³ Dalam konteks organisasi/gerakan, gerakan Islam modern berpandangan bahwa pembaharuan Islam adalah penemuan kembali prinsip atau ajaran dasar yang abadi yang dapat mengatasi ruang dan waktu. Secara umum,

³⁹ Jajat Burhanuddin, *Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elit Muslim dalam Sejarah Indonesia*, (Jakarta: Mizan Publika, 2012), h. 344.

⁴⁰ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, h. 7-14.

⁴¹ Ulasan lengkap lihat, *Ibid*, 37-50.

⁴² Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 M, oleh KH. Ahmad Dahlan atas saran dari murid-muridnya yang tergabung dalam Budi Utomo. Kelahiran Muhammadiyah pada awalnya menifestasi dari pemikiran dan amal perjuangan KH. Ahmad Dahlan (Muhammad Darwis) yang menjadi pendirinya. Organisasi lain yang mengidentifikasi diri sebagai gerakan Islam modern antara lain, Persatuan Islam (Persis), Al-Irsyad, dan sebagainya. Ulasan lengkap lihat, *Ibid*, 50-113. Masing-masing dari organisasi pembaharu ini bergerak dalam bidang amal yang berbeda-beda tergantung dari konsep pembaharuan yang diusung. Pun begitu, Umat Islam yang tergolong dalam golongan modern di awal abad ke-20 M ini menjadi mayoritas, mengingat Sarekat Islam sebagai salah satu organisasi Islam modern di awal kemunculannya berhasil menarik banyak pendukung dari seluruh lapisan masyarakat, walau dalam perkembangan selanjutnya para elit SI akan pecah dan menjadi pembaharu yang mandiri lewat organisasi-organisasi yang didirikannya. Lihat, Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara...*, h. 70-71.

⁴³ Gerakan ini di Indonesia memiliki pengaruh kuat di kalangan kelas menengah kota, mulai dari pengrajin, pedagang, seniman sampai para profesional. Sebagai sebuah fenomena kota, di antara karakteristik gerakan ini adalah melek huruf, yang pada akhirnya ciri ini menuntut adanya pendidikan. Sehingga pendidikan merupakan program yang paling utama. Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, h. 50.

orientasi ideologi keagamaan organisasi modern Islam ditandai oleh wawasan keagamaan yang menyatakan bahwa Islam merupakan nilai ajaran yang memberikan dasar bagi semua aspek kehidupan dan karenanya harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi mereka, pengamalan ini tidak hanya terbatas pada persoalan ritual-ubudiyah, tetapi juga meliputi semua aspek kehidupan sosial kemasyarakatan (dan berpuncak pada sosial politik).⁴⁴

Bahkan, golongan modernis Islam ini juga memunculkan varian (golongan) Islam “baru” di masanya. Adalah konsep Islam-Sosialis yang pernah diperkenalkan oleh Tjokroaminoto⁴⁵ dan Islam-Komunis yang diperjuangkan oleh H.Misbach, dkk.⁴⁶ Hal ini sekali lagi menandakan bahwa wacana pembaharuan Islam telah diartikulasikan berbeda antar golongan pembaharu sendiri serta melahirkan dinamika dan wacana *vis-à-vis*/berhadap-hadapan dalam banyak bidang, baik bidang sosial keagamaan maupun bidang politik. Cita-cita dan semangat modernisme ini bisa jadi berangkat dari latar belakang dan paham yang berbeda. Dari satu daerah dengan daerah yang lain. Atau dari satu organisasi

⁴⁴ Agenda, dan orientasi para pembaharu ini berbeda satu sama lain. Namun begitu, pembentukan organisasi Islam modern ini menandai bangkitnya Islam secara terorganisir. Jeff Lee, *The Failure of Political Islam in Indonesia: A Historical Narrative*, h. 88. Kekuatan artikulasi yang ditunjukkan oleh tiap organisasi Islam modern juga berbeda-beda satu sama lainnya. Hal ini dilatar belakangi dengan konsep pembaharuan yang mereka usung.

⁴⁵ Tjokroaminoto melihat prinsip dasar sosialisme adalah kemerdekaan, kesamaan, dan persaudaraan, Nilai-nilai ini juga terdapat dalam ajaran Islam dan sudah pernah dilaksanakan secara kongkrit pada masa Rasulullah dan para sahabat. Dalam konteks ini maka Tjokroaminoto menulis dalam salah satu bagian dari bukunya Islam dan Sosialisme dengan “*bagi kita orang Islam tidak ada sosialisme atau rupa-rupa isme yang lebih baik, yang lebih elok dan lebih mulia melainkan sosialisme yang berdasar Islam itulah saja*”. Terkait gagasan Islam-Sosialisme dapat lihat secara lengkap dalam, Tjokroaminoto, *Islam dan Sosialisme*, (Bandung: Segi Arsy, 2008).

⁴⁶ Diantara para tokoh Islam-Komunis lain, seperti H. Achmad Chatib di Banten dan H. Datuk Batuah di Padang Panjang, H. Misbach lebih dikenal sebagai penyokong penuh gagasan Islam-Komunis. Haji Misbach, seorang haji yang revolusioner asal Solo banyak menulis tentang Islam-Komunis di surat kabar yang dipimpinnya, *Medan Moeslimin*. H. Misbach pun pernah berujar “*Orang yang mengaku dirinya Islam, tetapi tidak setuju adanya komunisme, saya berani mengatakan ia bukan Islam sejati*”. Terkait gagasan Islam-Komunisme dapat lihat secara lengkap dalam, Nor Hiqmah, *H.M. Misbach: Kisah Haji Merah*, (Depok: Komunitas Bambu, 2008). Ulasan ringkas keduanya diwacanakan dengan istilah Islam-Kiri, lihat, Nor Huda, *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, h. 417-433.

dengan organisasi yang lain. Akan tetapi, secara umum gerakan-gerakan tersebut mencakup aspek sosial dan pendidikan serta aspek politik.

Kelompok terakhir yaitu kelompok/gerakan nasionalis-netral agama (sekular).⁴⁷ Kelompok ini kemudian diidentifikasi dengan istilah kelompok kebangsaan/nasionalis. Kelompok ini berasal dari kalangan pribumi yang umumnya -jadi tidak semuanya- beragama Islam, namun banyak sedikitnya telah ber-“emansipasi”, bersikap “maju”, dan mengambil sikap netral terhadap agama, malah sampai kepada sikap tidak peduli terhadap agama, walaupun tidak dapat dikatakan bermusuhan terhadap agama.⁴⁸ Kelompok/golongan ini identik dengan istilah -meminjam tipologi Clifford Geertz- “priyayi” dan di titik tertentu juga mencakup “abangan”⁴⁹ dan berpuncak pada munculnya Partai Nasionalis Indonesia (PNI) yang dipimpin Soekarno juga beberapa organisasi pergerakan lain.

⁴⁷ Padanan kata yang dapat disandingkan dengan terma netral-agama adalah sekular. Sekular adalah sifat-sifat yang menunjukkan pada suatu keadaan yang telah memisahkan kehidupan duniawi dari pengaruh agama atau hal-hal gaib. Lebih jauh lihat, Adian Husaini, *Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekular-Liberal*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 257-270.

⁴⁸ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, h. 235.

⁴⁹ Abangan, priayi, dan Santri, merupakan klasifikasi yang digali oleh Clifford Geertz dari masyarakat Jawa, khususnya masyarakat suatu kota di Jawa Timur (Pare, yang dalam penelitian Geertz disamakan menjadi Mojokuto) serta daerah pedesaan di sekitarnya, pada sekitar tahun 1964. Menurut Geertz pembagian masyarakat yang ditelitinya ke dalam tiga tipe budaya ini didasarkan atas perbedaan pandangan hidup di antara mereka. Subtradisi abangan menurut Geertz diwarnai berbagai upacara selamatan, praktik pengobatan tradisional, serta kepercayaan kepada makhluk halus dan kekuatan gaib itu terkait pada kehidupan di pedesaan. Subtradisi santri yang ditandai oleh ketaatan pada ajaran agama Islam serta keterlibatan dalam berbagai organisasi sosial dan politik yang bernafaskan Islam dijumpai di kalangan pengusaha yang banyak bergerak di pasar maupun di desa selaku pemuka agama. Subtradisi ketiga, priyayi, ditandai pengaruh mistik Hindu-Budha pra-kolonial maupun pengaruh kebudayaan Barat dan dijumpai pada kelompok elite kerah putih (*white collar elite*) yang merupakan bagian dari birokrasi pemerintah. Dengan demikian Geertz melihat adanya keterkaitan erat antara ketiga subtradisi ini (abangan, santri, dan priyayi) dengan tiga lingkungan (desa, pasar, dan birokrasi pemerintahan). Di tahun 1950-an dan 1960-an dijumpai suatu pengelompokan yang terdiri atas partai politik yang masing-masing mempunyai organisasi massa sendiri (suatu pengelompokan yang oleh Geertz dinamakan aliran). Di Jawa Geertz mengidentifikasi empat aliran: PNI, PKI, Masyumi, dan NU. Yang menarik ialah bahwa pola aliran tersebut kemudian dikaitkan dengan ketiga subtradisi. Geertz, memandang bahwa ketiga subtradisi tersebut melandasi pengelompokan aliran. Menurut pendapat ini aliran berhaluan Islam (Masyumi dan NU) didukung oleh kaum santri, PNI berintikan kaum priayi, dan PKI didukung oleh kaum abangan. Lebih jauh lihat, Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa* (terj: Aswab Mahasin), (Jakarta: Pustaka Jaya, 1981), h. 6-10.

Golongan ini lahir dari diberlakukannya sistem pendidikan barat yang sekular. Dalam perkembangan selanjutnya, golongan sekular kemudian bertemu dengan golongan Islam (baik tradisional dan terutama sekali golongan modern) dalam satu kesamaan cita-cita kemerdekaan nasional di Hindia Belanda.⁵⁰ Pada kelanjutannya kemudian, masyarakat Hindia Belanda lebih merasakan langsung polarisasi ini, namun teridentifikasi antara golongan nasionalis-agamis dan nasionalis sekular.⁵¹

Umat Islam Hindia Belanda yang tergabung dalam beragam kelompok dan organisasi pergerakan Islam ini, pada dasarnya diwakili oleh para elit-terdidik sebagai penggerak utama kelompok. Dalam konteks ini maka, para elit-terdidik (muslim) lah yang menjadi representasi -di samping representasi melalui organisasi pergerakan Islam- istilah “umat Islam”. Pun begitu, terdapat pula polarisasi kelas sosial elit-terdidik Islam ini menjadi elit-ulama-intelekt dan elit-intelekt-ulama.⁵² Secara sederhana, ulama-intelekt adalah ulama (keluaran pendidikan agama) yang melek pengetahuan modern. Adapun intelekt-ulama adalah intelegensia (keluaran pendidikan sekular) yang melek pengetahuan

⁵⁰ Meski kemudian dalam perjalanannya sering terjadi persaingan ketat antar keduanya. Namun begitu kondisi ini menyebabkan masyarakat pribumi yang selama ini ibarat suatu “telaga yang demikian tenang, mendadak berubah menjadi sungai besar yang deras membanjiri. Bangsa Indonesia bangkit menciptakan bentuk baru dalam kehidupan budaya, politik dan agama”. Lihat, Husnul Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, h. 5.

⁵¹ Keterpisahan antara dua kelompok ini telah berlangsung lama dan melalui proses yang cukup panjang, terutama sekali setelah isu Pan-Islam dan khilafah mereda di tahun 1929-an. Dalam perjalanannya, kedua kelompok lebih dirasakan persaingannya secara riil dalam mencari format nasionalisme Hindia Belanda. lihat, Abdul Aziz, *Chieftdom Madinah: Salah Paham Negara Islam*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011), h. 112-114.

⁵² Penggunaan terma elit yang mendampingi kedua kelas ini, sekali lagi mengacu pada betapapun lebarnya perbedaan di antara mereka, ada kesamaan diantaranya dimana baik ulama-intelekt dan intelekt-ulama Indonesia merupakan suatu kelompok minoritas dari (kelompok) elit modern Indonesia yang memiliki kesanggupan untuk memikul tanggung jawab kepemimpinan dalam masyarakat, dunia politik dan birokrasi Indonesia. Istilah elit di sini memiliki arti “minoritas” orang yang sangat berpengaruh dalam membentuk beragam struktur kelembagaan atau ranah aktivitas masyarakat. Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa...*, h. 32.

agama.⁵³ Kedua kelas sosial ini terdapat baik dalam kelompok tradisional maupun kelompok reformis, namun tidak dalam kelompok nasionalis-sekular.

Representasi para elit hanya terdiri dalam jumlah yang sedikit (minoritas), namun dapat mewakili umat Islam secara mayoritas. Hal ini disebabkan karena adanya kriteria-kriteria khusus yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi seorang pemimpin (elit) dimana kriteria tersebut tidak mampu atau tidak dimiliki oleh warga negara yang lain.⁵⁴ Fakta ini menunjukkan bahwa kelompok elit adalah kelompok yang memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri (keilmuan, kepemimpinan, perilaku sosial dan sebagainya) dimana kelebihan tersebut merupakan hasil pengakuan dari masyarakat. Seorang elit agama (Islam), apakah disebut dengan terminologi ulama, kyai, atau *da'i* tidak akan mampu menjalankan fungsi mereka, baik fungsi sosial keagamaan maupun fungsi politik jika tidak mendapat pengakuan dari masyarakat tentang keberadaan mereka. Para elit ini pulalah yang sebenarnya menjadi motor penggerak dalam berbagai organisasi.

⁵³ Pembagian kelas ini muncul dari penerapan politik kolonial yang segregatif dan diskriminatif, terutama sekali di bidang pendidikan. Sebagai contoh elit, Syekh Achmad Khatib bisa disebut sebagai prototip dari ulama-intelekt (*clerical-intelligentsia*) Indonesia. Sebelum melanjutkan studi ke Mekah, dia pernah mengenyam pendidikan Barat. Namun, yang menjadi kepedulian dan erudisi utamanya ialah pengetahuan agama. Sementara Agus Salim bisa disebut sebagai prototip intelektual-ulama Indonesia. Latar belakang pendidikannya yang utama ialah sekolah Barat (yaitu HBS, sekolah prestisius pada masanya). Namun dia sanggup mengembangkan pengetahuan agamanya saat berada di Mekah di bawah bimbingan Achmad Khatib. Selain terpelajar dalam pengetahuan saintifik modern, dia juga fasih dalam pengetahuan agama. *Ibid*, 731.

⁵⁴ Dari penelitian ini, peneliti dalam kerangka teoritis menggunakan teori trikotomi yang menekankan bagaimanakah para aktivis (elit) politik Muslim memberi respons terhadap berbagai tantangan yang dihadapkan kepada mereka oleh kelompok elit penguasa. Di titik ini maka, teori elit (politik) perlu pula untuk disampaikan. Terdapat dua tradisi akademik tentang elit. Dalam tradisi yang lebih tua, elit diperlakukan sebagai sosok khusus yang menjalankan misi historis, memenuhi kebutuhan mendesak, melahirkan bakat-bakat unggul. Elit dipandang sebagai kelompok yang menciptakan tatanan yang kemudian dianut untuk semua pihak. Dalam pendekatan yang lebih baru, elit dipandang sebagai suatu kelompok yang menghimpun para petinggi pemerintahan. Pengertian elit dipadankan dengan pemimpin atau pembuatan keputusan. Namun begitu, posisi elit agama juga mengalami pergeseran. Elit agama tidak lagi pada posisi tradisional yang hanya menempatkan diri sebagai orang yang dipercaya untuk memenuhi kebutuhan rohani masyarakat ke arah yang lebih baik, tetapi elit agama juga mampu memposisikan diri dalam aktifitas kehidupan politik dalam kerangka yang lebih luas. Pandangan ini didasarkan bahwa aspek-aspek maupun masalah-masalah sosial yang terjadi di tengah masyarakat yang semakin kompleks. Lihat, Nila Sastrawati, *Eksistensi Elit Agama dalam Dimensi Politik*, dalam *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 10, No. 2, November 2010, h. 258-259.

D. Ideologisasi Pan-Islam di Hindia Belanda

Dasawarsa ideologi di Hindia Belanda ditandai dengan beragamnya ideologi yang berkembang di masyarakat Hindia Belanda, termasuk di kalangan umat Islam Hindia Belanda. Pada masa ini paling tidak terdapat tiga ideologi yang memengaruhi umat Islam Hindia Belanda dalam konteks perjuangan pergerakan nasional yaitu Islam, Nasionalisme, dan Marxisme-Komunisme. Ketiga ideologi ini berkembang seiring dengan perkembangan pemikiran umat Islam dan direspon dengan pembentukan organisasi pergerakan dan akhirnya membentuk identitas politik umat Islam Hindia Belanda menjadi Islamisme, Nasionalis-Sekuler, dan Islam Komunis.⁵⁵

Jauh sebelumnya, penjajah Belanda menegaskan ideologisasinya melalui misi pengadabannya lewat dunia pendidikan. Misi pengadaban tersebut tak lain ingin menaruh arus gagasan asing di tengah-tengah gagasan-gagasan Islam yang sedang berkembang (Islamisasi). Proses ini menyebabkan Umat Islam di Nusantara mula-mula mengambil sikap yang resisten dalam merespon kolonialisme dan kemudian semangat resistensi tersebut berkembang dengan mulai mengenalkan gagasan kesadaran bahwa terdapat musuh bersama, kesadaran sejarah yang sama, dan kesamaan kepentingan yang melandasi perjuangan kebangsaan Islam. Pemahaman kebangsaan Islam yang terbentuk tentu juga tidak bisa dilepaskan dari adanya peran penting para ulama Nusantara yang telah berjuang dalam dakwah Islam (Islamisasi). Peran ulama ini juga tidak bisa

⁵⁵ Ketiga ideologi yang tumbuh ini pada dasarnya dilatarbelakangi dengan semangat yang sama yaitu anti kolonialisme dan imperialisme (barat). Lihat, Djohan Effendi, *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi: Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur*, (Jakarta: Kompas, 2010), h. 47-49.

dilepaskan dengan jaringan keilmuan dan gerakan generiknya secara internasional. Sudah sejak lama perhubungan Islam di seluruh dunia dilakukan oleh para ulama. Tradisi naik haji ke Mekah yang sejurus dengan menimba ilmu di sana sudah dilaksanakan sejak ratusan tahun dan masih berlanjut tatkala pengaruh kolonialisme semakin tertanam kuat di tanah jajahan. Meski politik Islam di tataran internasional berkembang dan berubah, transmisi ideologisasi Islam di dunia Islam itu tetaplah menjadi pengaruh utama, dan pada fase tertentu telah merumuskan reaksi terhadap kolonialisme di dunia Islam.

Ideologisasi Islam kemudian tumbuh secara bertahap dalam kondisi dunia yang semakin maju di berbagai bidang kehidupan. Secara khusus, ideologisasi Islam ini tumbuh pesat setelah dibukanya Terusan Suez di Mesir pada tahun 1869. Pembukaan Terusan Suez menjadi jalan masuk utama atas terjadinya transmisi ideologi Islam di Hindia Belanda. Hal ini mengingat kemajuan transportasi akan selalu berbanding lurus dengan kemajuan teknologi informasi. Hasilnya, peristiwa pembukaan Terusan Suez ini menyebabkan lalu lintas transportasi -terutama transportasi laut jarak jauh- menjadi semakin cepat dan dibarengi dengan penyebaran informasi berupa pemikiran-pemikiran modern baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membangkitkan kesadaran berbangsa dengan dilandasi agama yang membentang mulai dari Timur Tengah sebagai pusatnya hingga ke kawasan Asia Tenggara. Berbagai pemikiran modern ini awalnya tumbuh sebagai dampak dari kekhawatiran umat Islam akan kondisi keagamaannya sendiri. Namun begitu, pada perjalanannya, hal ini dapat pula berarti sebagai upaya perlawanan terhadap berbagai ideologi lain yang

bertentangan dengan Islam. Dampaknya jelas, ideologisasi Islam kemudian menggerakkan umat Islam untuk melawan berbagai dominasi kekuatan asing yang ada di kawasannya.⁵⁶

Ideologisasi Islam di Hindia Belanda sendiri awalnya (masih) terpusat pada ajaran jihad atau perang sabil⁵⁷ dan terbina dalam pesantren dan ajaran tarekat. Kyai menjadi tokoh pemimpin yang berpengaruh dalam menggerakkan massa dan pesantren menjadi pusat pendidikan agama sekaligus tempat pendidikan kader pemimpin agama.⁵⁸ Ideologisasi Islam yang tumbuh di Hindia Belanda ini bersumber dari tradisi Islam yang telah ada sejak zaman kesultanan Islam berdiri. Dengan begitu maka, corak Islam yang tumbuh juga bersifat mistik dan sufistik dan dapat bersanding dengan damai dengan corak Islam secara fikih walau dengan kadar yang berbeda.⁵⁹

Dalam perkembangannya, ideologisasi Islam yang kemudian masuk ke HindiaBelanda berubah menjadi arus pembaruan Islam yang terutama bersumber dari Abd-al Wahhab yang diteruskan melalui para pengikutnya yang dikenal dengan istilah Wahhabi. Gelombang pertama transmisi ideologi ini dibawa oleh para haji yang berasal dari Sumatera Barat. Mereka antara lain H. Sumanik, H. Piobang, dan H. Miskin.⁶⁰

⁵⁶ Dorodjatun Kuntjorojakti, *Menerawang Indonesia Pada Dasawarsa Ketiga Abad ke-21*, (Tangerang: Alvabet, 2012), h. 125-126.

⁵⁷ Ajaran jihad atau perang sabil bahkan telah ada jauh sebelum Belanda datang ke Indonesia. Lihat, Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah: Perang Aceh 1873-1912*, (Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 1987), h. 109

⁵⁸ Terutama sekali gerakan Tarekat (Islam) yang terbukti melakukan perlawanan di berbagai daerah, seperti Cianjur, Banten, Garut, dan Pekalongan. Lihat, Husnul Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, h. 64-78. Dapat pula lihat, Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium Jilid 1*. (Jakarta: Gramedia, 1988).

⁵⁹ Jan S. Aritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*, h. 123.

⁶⁰ Pada perkembangan selanjutnya transmisi ideologi ini semakin menyebar di Sumatera Barat melalui perantara Tuanku Imam Bonjol dan Tuanku Rao. Lihat, *Ibid*, 124.

Gelombang kedua ideologisasi Islam kemudian memiliki sumber lebih beragam dan dengan corak yang juga beragam mengingat transmisi ideologi ini berlangsung setelah Terusan Suez resmi dibuka pada tahun 1869. Sumber-sumber pembaruan Islam pada gelombang kedua ini berasal dari tokoh-tokoh di Timur Tengah, terutama dari Mesir, seperti Jamaluddin al-Afgani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha. Di Hindia Belanda, transmisi ideologi pada gelombang kedua ini juga melalui perantara para pribumi yang pergi haji baik yang mukim maupun yang nanti akan kembali lagi. Mereka antara lain Ahmad Khatib, Muhammad Jamil Djambek, H. Rasul, H. Abdullah Ahmad, K.H. Ahmad Dahlan, dan lain-lain.

Selain dari Mekah dan Mesir, posisi Turki juga menjadi penting sebagai salah satu pusat pembaruan Islam. Di Turki, berkembang paham Pan-Islam sebagai paham yang diadaptasi oleh Sultan Abdul Hamid II dari Jamaluddin al-Afgani.⁶¹ Pada mulanya, Pan-Islam memang tak lepas dari figur dan kepemimpinan khalifah. Ada kaitan erat antara ide Pan-Islam dan jabatan yang disandang oleh Sultan Turki. Sejak abad ke-16 M, Sultan-Sultan Turki telah mengangkat diri sebagai khalifah serta pelindung Mekah-Madinah. Sejak abad ke-18 M secara pelan-pelan Sultan Utsmani mulai memanfaatkan ide khalifah ini semacam “Paus Islam”. Demikianlah sampai awal abad ke-20 M, secara turun temurun kepala negara Turki selalu menggunakan gelar sultan dan khalifah. Sebagai Sultan, ia memiliki kekuasaan duniawi untuk mengatur negara, dan

⁶¹ M. Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*, h. 306-307.

sebagai khalifah mempunyai wewenang rohani untuk mengurus masalah agama.⁶²

Pan-Islam sendiri secara luas diartikan sebagai solidaritas di antara umat Islam. Dua sarana untuk memperkuat perasaan solidaritas sesama umat Islam sedunia ialah ibadah haji dan khilafah (sistem pemerintahan Islam).⁶³ Pan-Islam secara terminologis dapat dipahami dari tiga pengertian. Pertama, penentangan secara umum terhadap kolonialisme Barat dengan berbasis Islam dan umat Islam di setiap daerah koloni. Kedua, alat yang digunakan Sultan Turki Utsmani Abdul Hamid II (berkuasa, 1876-1909 M) untuk mempertahankan dan mengembangkan pengaruh kekuasaan Turki Utsmani atas Dunia Islam. Ketiga, usaha

⁶² Husnul Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, h. 79.

⁶³ Lihat, Taufik Abdullah, dkk, (ed.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Khilafah*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, tt), h. 255. Secara historis, munculnya istilah/terma Pan-Islam sebenarnya berasal dari kalangan non-Muslim. Penggunaan secara luas istilah itu pertama kali dilakukan oleh Gabriel Charnes, seorang jurnalis Perancis yang tertarik dengan Turki Utsmani. Dia memakai istilah itu sebagai varian dari istilah-istilah yang telah ada seperti Pan-Slavisme, Pan-Jermanisme, atau Pan-Hellenisme. Meski demikian, ide mengenai persatuan Islam (sedunia) sendiri telah beredar secara diam-diam di kalangan Kaum Turki Muda yang berdiri pada tahun 1865 yang telah menggunakan istilah *Ittihad-i Islam* (Persatuan Islam) pada akhir tahun 1860-an. Istilah ini kemudian secara umum berubah menjadi *Wahdat al-Islām* (atau *al-Wahda al-Islūmmiyya*) dalam bahasa Arab, dan kemudian menjadi *Jūmi'at al-Islām*, yang kesemuanya berarti persatuan Islam atau perhimpunan Islam. Majalah *Al-'Urwa alwuthqū* lah yang berperan dalam pemakaian istilah-istilah bahasa Arab tersebut dalam sebuah artikelnya dalam majalah yang diterbitkan dan dieditori oleh al-Afghani dan Abduh pada tahun 1884. Pada saat itu istilah Pan-Islam semakin luas dipakai oleh Gabriel Charnes dan jurnalis lainnya di Perancis. Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa...*, h. 236. Secara konseptual, istilah ini mengacu pada suatu ideologi yang menyerukan persatuan seluruh umat Islam dalam mendukung keyakinan mereka. Sebagai sebuah konsep keagamaan, konsep ini sebenarnya telah ada sejak awal kehadiran Islam. Ulama dan fuqaha sering menggunakan konsep ini dalam upaya mendorong umat Islam untuk membangun kerja sama dan solidaritas. Secara ideal, Pan-Islam menekankan agar umat Islam dapat bersatu secara universal, sebagaimana yang pernah ada pada masa-masa awal Islam atau masa kerajaan imperium Islam pada masa lalu. Karena Islam adalah agama yang sangat politis, begitu pula konsep Pan-Islam ini, terutama sejak 1870-an ketika kolonialisme Eropa sedang memuncak. Kemudian, konsep ini menjadi ideologi yang defensif, untuk menaikkan moral umat Islam yang didominasi oleh penjajah asing dan sekaligus untuk menyelamatkan negara-negara umat Islam yang masih merdeka dari nasib serupa. Lihat, John L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, (New York: Oxford University Press, 1995), h. 300-301. Secara mudah, Pan-Islam adalah suatu pembaharuan atau gagasan untuk menyatukan dunia Islam dengan semangat kaum muslim atau perjanjian antara pemerintah-pemerintah Islam yang dipimpin oleh pemimpin paling kuat dan besar. Lihat, Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di Timur Tengah*, (Jakarta: Djambatan, 1995), h. 288. Dalam konteks wacana pembaruan Islam di Hindia Belanda, Pan-Islam dapat dipahami sebagai upaya reformasi Islam yang tidak hanya terbatas pada revitalisasi keyakinan dan praktik-praktik keagamaan tapi juga mengacu pada dimensi modern. Dalam hal ini berarti mengintegrasikan pemikiran dan institusi modern dengan Islam. Lihat, Jajat Burhanuddin, *Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elit Muslim dalam Sejarah Indonesia*, h. 254-255.

membangkitkan kembali sistem kekhalifahan pasca keruntuhan Khilafah Turki Utsmani pada tahun 1924.⁶⁴

Pan-Islam merupakan gagasan dan tindakan baru di Hindia Belanda kala itu. Sebagai suatu gagasan baru, tentu saja ia mengundang dinamika masyarakat muslim yang bermuara pada terjadinya perubahan sosial. Perubahan ini terjadi karena anggota masyarakat terbuka pada pengaruh dari luar dan menerima atau menolak ide baru itu berdasarkan kebutuhan. Kebutuhan itu sendiri tak lain adalah pemenuhan usulan-usulan keagamaan yang sesuai dengan keyakinan mereka. Dalam konteks ini, umat Islam Hindia Belanda merespon Pan-Islam dengan bersikap akomodatif/terbuka terhadapnya. Hal ini jelas mengingat ideologi Pan-Islam merupakan alasan utama umat Islam Hindia Belanda menaruh perhatian besar pada kedudukan khalifah di Turki. Perhatian ini semakin membesar ketika Turki Utsmani mengembangkan Pan-Islam sebagai dasar politiknya.

Meskipun demikian, awalnya ide Pan-Islam ini ditransmisikan dalam bentuk yang belum begitu kongkrit -hanya berupa “rasa” persatuan- yang terbatas pada bidang sosial. Namun, setelah bergulir persoalan khilafah di Dunia Islam, pengembangan wacana Pan-Islam memperoleh momen sekaligus menjadi isu yang tepat. Berbeda dengan isu-isu soal *fiqh* yang seringkali berbeda, persoalan khilafah dapat dikatakan memiliki kejelasan hukum yang (hampir) tidak diperdebatkan. Jadi pada masa ini hampir tidak ada penolakan dalam umat Islam di Hindia Belanda ketika itu. Nantinya, Pan-Islam dikembangkan lebih jauh menjadi paham yang paling penting dalam konteks perjuangan umat Islam Hindia

⁶⁴ Lihat dalam, Departemen Agama RI, *Ensiklopedia Islam 1*, (Jakarta: Departemen Agama, 1993), h. 79-80.

Belanda dalam melawan kolonialisme dan memunculkan kesadaran dan persatuan umat akan perjuangan menuju kemerdekaan.

Dalam konteks ini pula dapat disimpulkan bahwa ideologi Pan-Islam di Hindia Belanda sejatinya berasal dari luar Hindia Belanda (saat ini dapat disebut sebagai gagasan transnasional). Hal ini juga merupakan salah satu bentuk gagasan pembaharuan -di antara banyak macam gagasan pembaharuan- Islam yang diusung para pembaharu pribumi yang memiliki kaitan yang erat dengan para pemikir-pembaharu, -terutama dari Mesir-⁶⁵ serta kembali menegaskan bahwa hubungan Pan-Islam, khilafah Turki Utsmani, dan umat Islam Hindia Belanda telah sedemikian erat. Walau kemudian letak kepulauan Hindia (Belanda) relatif sangat jauh dari pusat ide Pan-Islam, perhatian dunia Islam (terutama Mekah dan Mesir juga Turki) tidak luput dari masyarakat Hindia Belanda. Perhatian ini terutama sekali ditujukan pada umat Islam yang masih dalam cengkraman penjajahan Belanda.⁶⁶

Di Hindia Belanda, ideologi Pan-Islam ini mula-mula banyak ditransmisikan oleh orang-orang Arab yang tinggal di Hindia Belanda. Pada perkembangannya, paham Pan-Islam yang berasal dari Turki ini kemudian banyak pula diakses oleh (elit) pribumi, seperti dapat dilihat dalam tabel berikut.

⁶⁵ Berkembangnya Pan-Islam pada awalnya berasal dari gagasan Jamaluddin al-Afghani setelah mengadakan perjalanan ke berbagai kawasan dan berujung di Mesir. Gagasan Pan-Islam ini juga yang kelak dilanjutkan oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Terkait riwayat hidup, pemikiran, dan pengaruh ketiga tokoh tersebut dapat lihat, J. Suyuthi Pulungan, *Ide Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha Tentang Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, dalam *Jurnal Tamaddun*, (Fakultas Adab dan Budaya Islam UIN Raden Fatah Palembang, 2013), h. 1-22. Lihat pula, J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 280-284. Lihat pula, Jajet Burhanuddin, *Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elit Muslim dalam Sejarah Indonesia*, h. 255-262.

⁶⁶ Dunia Islam secara umum melihat bahwa Belanda adalah negara Eropa yang paling tiranik dan kejam dalam menghadapi orang-orang Islam. Dititik ini maka, upaya saling memengaruhi antara dunia Islam dengan Hindia Belanda terjadi. Hal ini membuktikan pula bahwa posisi umat Islam di Hindia Belanda tidaklah terisolir dari dunia luar. Husnul Husnul Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, h. 91-92.

Tabel Tokoh Pentransmisi/Agen Gagasan Pan-Islam di Hindia Belanda

No.	Nama Tokoh	Sumber Gagasan	Peranannya di Hindia Belanda
1.	Taher Jalaludin	Berguru langsung dengan Muhammad Abduh	Menerbitkan surat kabar al-Imam yang memuat semangat Pan-Islam
2.	Abdul Karim Amrullah (H. Rasul)	Haji ke Mekah dan mengakses langsung karya pembaharu dari Mekah dan Mesir yang dipelajari dari Ahmad Chatib	Menjadi agitator Pan-Islam
3.	Ahmad Dahlan	Haji ke Mekah dan mengakses langsung karya pembaharu dari Mekah dan Mesir yang dipelajari dari Ahmad Chatib	Mendirikan Muhammadiyah dan mengembangkan konsep kesatuan hidup manusia yang mirip dengan konsep Pan-Islam
4.	Tjokroaminoto	Bergaul dengan tokoh Pan-Islam dari India, Hasan Ali Sourati	Menjadi agitator Pan Islam dan menjadikan Pan-Islam sebagai asas Sarekat Islam
5.	A.R. Fachrudin	Berhaji ke Mekah dan bergaul dengan para mukimin di Mekah	Menjadi agitator Pan-Islam
6.	Agus Salim	Bekerja di Konsul Jeddah dan mengakses langsung karya para pembaharu Islam	Menjadi agitator Pan Islam dan menjadikan Pan-Islam sebagai asas Sarekat Islam
7.	Ahmad Surkati	Bergaul dengan Muhammad Abduh	Mendirikan al-Irsyad
8.	Abdul Azis al-Musawi dan Galib Beik	Konjen Turki di Batavia yang memiliki akses langsung dengan Pan-Islam di Turki	Mendukung dan melindungi para pendukung Pan-Islam melalui konjen Turki di Batavia
9.	Ali Shahab dan Idrus Shahab	Bergaul dengan pembaharu dari Timur Tengah dan menjadi koresponden surat kabar al-Manar	Mendirikan Jamiatul Khaer dan menjadi penghubung langsung dengan konsul Turki Utsmani di Hindia Belanda
10.	Sayyid	Bergaul langsung	Agitator Pan-Islam dan

	Abdullah	dengan Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha	penyandang dana bagi kampanye Pan-Islam di Hindia Belanda
11.	Ahmad Badjned dan Said Badjned	Menjadi pelajar di Turki Utsmani	Menjadi pendidik di sekolah/akademi militer di Batavia
12.	Ahmad Hassan	Bergaul dengan Ahmad Surkati dan pembaharu dari India	Mendirikan Persis
13.	Hasyim Asy'ari	Mukim di Mekah dan mengakses langsung karya pembaharu dari Timur Tengah melalui Ahmad Khatib	Mendirikan Nahdhatul Ulama
14.	M. Natsir	Bergaul dengan tokoh Pan-Islam pribumi seperti Agus Salim dan Ahmad Hassan	Menjadi agitator Pan-Islam dan mendirikan Masyumi
15.	S.M. Kartosoewirjo	Bergaul dengan tokoh Pan-Islam pribumi seperti Tjokroaminoto dan Agus Salim	Menjadi agitator Pan-Islam

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Umat Islam merupakan salah satu kelompok masyarakat yang hidup di kawasan Hindia Belanda yang merupakan kawasan yang luas dan plural. Dalam konteks ini, para pentransmisi ini merupakan unsur penting dalam membentuk struktur masyarakat Islam di Hindia Belanda. Mereka adalah elit/tokoh yang mampu membentuk identitas dan kontrol dalam masyarakat. Dalam konteks ini pula, ideologisasi Pan-Islam di tubuh umat Islam Hindia Belanda ini kemudian mengakibatkan semakin diperjelasnya struktur internal -dari sudut pandang identitas sosial politik- di tubuh umat Islam.

Dalam proses ini, ideologi menjadi seperangkat kepercayaan-kepercayaan yang terlembaga, dapat menyatukan gagasan tingkah laku, dan karakter individu serta memunculkan suatu kekuatan pengikat dari para penganut ideologi tersebut. Pendek kata, ideologisasi ini semakin memperjelas identifikasi diri (*self*) dan integrasi kelompok manakala terjadi pertarungan dalam struktur sosial. Ideologisasi ini turut pula menyebabkan munculnya wacana pembaruan Islam yang nantinya juga berdampak pada identitas di internal umat Islam Hindia Belanda.

Identifikasi ini dilakukan dengan respon berupa perilaku secara terbuka. Artinya para tokoh tersebut merespon stimulus -Pan-Islam- dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek, yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat oleh orang lain. Namun demikian, bentuk tindakan atau praktek secara terbuka ini akan mungkin mengalami perbedaan dan bahkan mengalami perubahan.⁶⁷

E. Relasi Pan-Islam, Turki Utsmani, dan Umat Islam Hindia Belanda

Hubungan antara Turki Utsmani dan Nusantara telah lama dimulai semenjak abad ke-16 M, seperti yang telah disampaikan dalam latar belakang penelitian ini. Dalam perkembangannya, kaitan antara Turki Utsmani dan Nusantara semakin diperkuat dengan wacana pembaharuan Islam berupa gagasan Pan-Islam. Dengan begitu, kaitan antara ketiga hal ini di awal abad ke-20 M di Hindia Belanda menjadi begitu erat.

⁶⁷ Lihat dalam, Kartini Kartono, *Psikologi Umum*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 121.

Paling tidak ada beberapa saluran⁶⁸ dimana Pan-Islam dapat masuk ke Hindia Belanda. Saluran haji menjadi saluran yang berkontribusi besar atas masuk dan berkembangnya wacana Pan-Islam di Hindia Belanda. Pada perkembangannya, wacana Pan-Islam dengan saluran haji di akhir abad ke-19 M menjadi semakin strategis setelah dibukanya Terusan Suez (1869) yang makin mempermudah hubungan Arab dengan kawasan Timur Tengah dan Nusantara. Dibukanya Terusan Suez sebagai jalur transportasi yang mampu mengefektifkan waktu tempuh para haji sehingga memungkinkan terjadinya kontak langsung antara umat Islam Hindia Belanda dengan dunia Islam lainnya, termasuk negara-negara Arab dengan lebih efektif.

Sejak itu pula jumlah umat Islam Hindia Belanda yang naik haji makin bertambah banyak. Hal ini diperdalam dengan budaya mukim para haji pribumi di Mekah untuk memperdalam ilmu-ilmu Islam dan pada akhirnya bersentuhan pula dengan ide Pan-Islam. Demikian pula imigran Arab yang berdatangan ke Hindia Belanda, semakin meningkat. Mereka umumnya berangkat dari Hadramaut, Yaman, baik sebagai pedagang maupun *da'i*. Di samping menjajakan dagangannya di Hindia Belanda, mereka juga menyebarkan ide-ide Pan-Islam terutama dalam kalangan keturunan mereka (Arab) yang telah lebih dulu datang ke Hindia Belanda.⁶⁹

⁶⁸ Yaitu saluran haji, para pelajar, dan media massa cetak. Lihat, Chiara Formichi, *Islam and The Making of The Nation: Kartosoewiryo and Political Islam in 20th Century Indonesia*, (Leiden: KITLV Press, 2012), h. 64.

⁶⁹ Terutama sekali mengenai jamaah haji Hindia Belanda yang mukim di Mekah dengan yang hanya beberapa bulan saja di Mekah. Dititik ini, jamaah haji yang mukim lebih berpeluang besar dalam berinteraksi dengan pergaulan dunia Islam secara Internasional, termasuk juga mengenal wacana Pan-Islam dan kemudian menyebarkanluaskannya kemudian dengan beragam cara. Posisi orang Arab di Hindia Belanda juga diawasi dengan ketat juga mengingat bahwa orang Arab di Hindia Belanda juga berpotensi besar dalam perkembangan Pan-Islam. Bahkan kedudukan orang Arab ini begitu penting dimana dalam beberapa kasus permusuhan umat Islam pribumi Hindia Belanda terhadap pemerintah kolonial terjadi karena kebijakan

Wacana Pan-Islam yang kemudian masuk ke Hindia Belanda tidak hanya identik dengan Mesir melalui Terusan Sueznya, namun menjadi identik pula dengan Turki Utsmani. Hal ini kemudian turut pula dihubungkan dengan haji, mengingat Turki Utsmani adalah pihak yang bertanggung jawab secara tidak langsung dalam menjaga pelayaran haji dari Hindia Belanda di abad-abad sebelumnya.⁷⁰ Bahkan di tahun 1915, dimana Turki Utsmani terlibat dalam Perang Dunia I, tidak terdapat jamaah haji asal Hindia Belanda yang berhasil mencapai Mekah dan hanya mencapai Jeddah.⁷¹ Hal ini menandakan bahwa saluran haji dan wacana Pan-Islam yang berkaitan dengan Turki Utsmani menjadi erat satu sama lain. Dalam rangka mengawasi Pan-Islam, pemerintah kolonial bahkan sampai harus mengawasi pribadi-pribadi tertentu, terutama sekali bangsawan dan pejabat pribumi. Bahkan pengawasan ini juga dilakukan terhadap berbagai pihak dari kalangan pribumi yang akan berangkat haji dan kemudian studi di Turki pun sebaliknya.⁷²

Meskipun begitu, pemberangkatan haji umat Islam Hindia Belanda tetap dilaksanakan secara rutin. Hal ini dapat dipahami dari kompleksnya dimensi

pengawasan yang ketat terhadap orang Arab yang ada di Hindia Belanda. Jam'iat Khaer sebagai organisasi yang mayoritas terdiri dari orang Arab yang tinggal di Hindia Belanda bahkan memiliki hubungan yang dekat dengan Turki Utsmani. Bahkan, Sultan Abdul Hamid II yang tinggal di Istanbul pun pernah mengirimkan utusannya, bernama Ahmed Amin Bey, atas permintaan dari perkumpulan tersebut untuk menyelidiki keadaan kaum Muslim di Hindia Belanda. Sebagai akibatnya, pemerintah Kolonial Hindia Belanda kemudian menetapkan pelarangan bagi orang-orang Arab mendatangi beberapa daerah tertentu. Lihat, Husnul Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, h. 92-96. Lihat pula, Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, h. 68-73.

⁷⁰ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII Akar Pembaharuan Islam Indonesia Edisi Perenial*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 36-37.

⁷¹ Pada akhirnya pemerintah Kolonial Belanda kemudian mengirimkan 5 kapal uap untuk memulangkan kembali "warganya" ke Hindia Belanda. hal ini dilakukan sesuai dengan arahan dari Snouck Hurgronje agar dapat menghindari perang, disamping dengan alasan agar umat Islam Hindia Belanda tidak melihat sepak terjang Turki Utsmani secara langsung dalam Perang Dunia I. Pasca berakhirnya PD I, maka jumlah jamaah haji Hindia Belanda di tahun 1920-an melonjak dengan sangat tajam. Martin van Bruinessen, *Muslim of the Dutch East Indies and The Caliphate Question*, dalam *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 2, No. 3, tahun 1995, h. 118.

⁷² M. Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*, h. 309-311.

dalam pelaksanaan ibadah haji. Haji mengandung tidak sekedar dimensi politis, namun juga dimensi sosial dan (terutama) ekonomi. Lalu lintas perputaran ekonomi yang sangat besar dapat menjadi alasan bagi pemerintah Hindia Belanda untuk tetap terus menyelenggarakan pelaksanaan ibadah haji walau mereka telah mengetahui dan khawatir atas dampak langsung dari berangkatnya umat Islam Hindia Belanda untuk haji.

Saluran kedua yaitu melalui media massa. Jalur ini semakin mempercepat masuknya gagasan gerakan pembaharuan Islam dari Timur Tengah ke Hindia Belanda. Penyebarannya melalui surat kabar, majalah, buku-buku, dan brosur-brosur, serta media cetak lainnya. Salah satu majalah paling berperan dalam mentransfer wacana Pan-Islam ke seluruh dunia Islam termasuk Hindia Belanda saat itu ialah majalah *Al-'Urwatul Wutsqa*. Majalah ini diterbitkan Jamaluddin Al-Afgani dan Muhammad Abduh yang ketika itu keduanya berada dalam pengasingan di Paris. Meski majalah *al-'Urwatul Wutsqa* ini berumur pendek, -hanya sempat terbit 18 nomor- namun pengaruhnya cukup mendapat perhatian luas di berbagai benua.⁷³ Tak hanya di negeri-negeri Islam, melainkan dunia barat dan tokoh-tokoh Eropa mendapat perhatian khusus terhadap majalah ini. Sebab, isinya selain menyerukan persatuan umat Islam berjihad melawan jajahan Barat, juga membedah berbagai doktrin kolonialisme atas jajahannya

⁷³ Maksud dari penerbitan majalah ini ialah untuk memberikan penggerak dan bimbingan kepada seluruh umat Islam agar mereka dapat memahami dan melaksanakan ajaran Islam, mampu menyatukan dan memegang peranan didalam memakmurkan dunia material maupun spiritual, sehingga memberikan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Inti dari yang terpenting adalah bagaimana umat Islam dapat bersatu dan dapat menjadi kuat. Dalam konteks Hindia Belanda, Pemerintah Hindia Belanda kemudian melarang peredaran majalah *Al-'Urwatul Wutsqa*. Mereka mengawal ketat agar majalah itu tak masuk Hindia Belanda, karena dikhawatirkan isinya sangat membahayakan kedudukan Belanda. Pun begitu, arus gerakan dan gagasan Pan-Islam ternyata sulit dibendung, majalah *Al-'Urwatul Wutsqa* tetap mencari celah masuk ke Indonesia untuk menyebarkan Pan-Islam. Lihat, HM. Mustafa Kamal Pasha, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*, (Yogyakarta: LPPI UMY, 2003), h. 49.

terhadap dunia Islam. Selain majalah *al-'Urwatul Wutsqa*, yang menopang arus gerakan pembaharuan Islam masuk ke Hindia Belanda adalah majalah *al-Jawaib* dan *al-Ihsan* dari Istanbul, Turki.⁷⁴ Kemudian *al-Janna*, *Lisanul Hal* dan *Samaratul Funun* dari Bairut, serta *al-Wathan* dari Kairo.⁷⁵

Sebagai saluran transmisi informasi/komunikasi, media massa melakukan proses pengemasan pesan, dan mempropagandakannya. Dalam proses pengemasan pesan, media dapat memilih fakta yang akan dimasukkan atau yang akan dibuang ke dalam teks pemberitaan. Selanjutnya, dalam membuat berita, media juga dapat memilih simbol-simbol atau label tertentu untuk mendeskripsikan suatu peristiwa. Kedua hal inilah yang pada akhirnya akan menentukan gambaran/image yang terbentuk dalam benak khalayak mengenai suatu peristiwa. Maka, dalam konteks transmisi Pan-Islam, semua media yang mempropagandakannya bertujuan tidak lain untuk membuat citra dirinya semakin terlihat baik di mata sebagian besar masyarakat dan memunculkan kecenderungan untuk menyebarkan informasi yang buruk untuk lawannya.

Selain dua saluran di atas, proses pembaharuan Islam di Hindia Belanda juga terjadi lewat pertukaran pemuda, khususnya pemuda-pemuda Hindia Belanda

⁷⁴ Selain itu, terdapat aktivitas konsul Turki Utsmani di Hindia Belanda yang membagi-bagikan mushaf Al-qur'an atas nama sultan, dan pencetakan karya-karya teologi Islam dalam bahasa Melayu yang dicetak di Istanbul. Di antara kitab tersebut adalah tafsir Al-qur'an yang di halaman judulnya menyebut "Sultan Turki Raja semua orang Islam". Pernyataan ini dapat didefinisikan sebagai upaya Turki Utsmani mendapat dukungan umat Islam di Hindia Belanda. Abu Bakar Atjeh, *Salaf Muhyi Atsaris Salaf: Gerakan Salafiyah di Indonesia*, (Jakarta: Permata Djakarta, 1970), h. 103-104.

⁷⁵ Beberapa media ini banyak dikonsumsi oleh para pembaharu (pribumi) di Hindia Belanda semisal Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Ahmad Dahlan dianggap banyak mendapat dorongan dan inspirasi dari berbagai majalah itu -terutama *Al-'Urwatul Wutsqa-* yang diselundupkan melalui pelabuhan Tuban, Jawa Timur. Bahkan ada yang mengatakan, motivasi Dahlan mendirikan Muhammadiyah (1912) adalah setelah ia membaca tulisan-tulisan dari majalah itu. Nab Bahany A.S, "Pergumulan Ideologi Pembaharuan Islam di Indonesia", dalam *Makalah Diskusi Lembaga Studi Kebudayaan dan Pembangunan Masyarakat (LSKPM)*, Banda Aceh, 24 Januari 2012. h. 2-3. Lihat pula, Ahmad Faizin Karimi, *Pemikiran dan Perilaku Politik Kiai Haji Ahmad Dahlan*, (Gresik: Muhi Press, 2012), h. 62-67. Ulasan tentang generasi pertama media massa Islam yang berkembang di Indonesia dapat dilihat, Beggy Rizkiyansyah, "Lahirnya Pers Islam di Indonesia", dalam *Makalah Diskusi Bulanan Jejak Islam Bangsa (JIB)*, Bogor, 24 Maret 2014.

yang belajar ke Kairo (Mesir) dan Istanbul (Turki). Dalam hal ini, dapat ditarik benang merah identifikasi antara Pan-Islam yang identik dengan Turki Utsmani. Hal ini terutama sekali terjadi ketika masa pemerintahan Sultan Hamid II.⁷⁶

Ia sengaja menawarkan beasiswa bagi pelajar Hindia Belanda untuk mengikuti pendidikan tinggi di Turki atas biaya Sultan. Bak gayung bersambut, para pelajar Hindia Belanda yang saat itu sulit memperoleh pendidikan tinggi lekas memanfaatkan kesempatan tersebut. Maka di era 1880-an, pemuda-pemuda Hindia Belanda berduyun-duyun mengikuti pendidikan tinggi ke Istanbul dan juga ke Kairo. Sementara itu, di Hadramaut saat itu banyak pemuda Hindia Belanda telah belajar di sana, terutama pemuda-pemuda keturunan Arab dari Batavia, Surabaya, dan Sukabumi. Walaupun tempat belajar agak jauh dari pusat gerakan pembaharuan Islam di Mesir dan Istanbul, namun mereka lebih mudah memperoleh informasi yang membuka wawasan (berfikir maju) tentang Islam, sehingga ide-ide pembaharuan dan semangat Pan-Islam yang diperoleh dari bacaan-bacaan selama belajar di sana dapat dengan mudah mereka terapkan ketika kembali ke Hindia Belanda (Indonesia).⁷⁷

Pemerintah kolonial Belanda amat khawatir bila kaum Muslim kemudian mengetahui adanya informasi bahwa Sultan Abdul Hamid II telah menyediakan beasiswa untuk pemuda Islam. Kekhawatiran ini muncul dengan anggapan jika umat Islam Hindia Belanda dapat masuk sekolah-sekolah yang paling tinggi untuk

⁷⁶ Ulasan singkat soal Sultan Abdul Hamid II dapat lihat, Muhammad Harb, *Catatan Harian Sultan Abdul Hamid* (terj: Abdul Halim), (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004).

⁷⁷ Nab Bahany A.S, "Pergumulan Ideologi Pembaharuan Islam di Indonesia", h. 3-4. Ulasan lengkap terkait peranan dan kebijakan politik Abdul Hamid II di Hindia Belanda dapat lihat, Rashed Chowdhury, *Pan-Islamism and Modernisation During The Reign of Sultan Abdul Hamid II, 1876-1909*, (Canada: A Ph.D thesis, McGill University, 2011), h. 246-254. Dititik ini pula, para pelajar yang akan berangkat ke Turki dari berbagai jalur juga diawasi dengan ketat oleh pemerintah kolonial Belanda.

menerima pendidikan ilmiah dan menemukan kesadaran yang mendalam tentang superioritas setiap muslim atas orang-orang “kafir”, serta kesadaran dan kehinaan yang mendalam yang tidak harus mereka terima dengan membiarkan diri mereka diperintah oleh orang kafir itu. Kekhawatiran ini semakin bertambah jika mereka telah menyelesaikan studinya dan telah melakukan ibadah haji ke Mekah, serta dapat berperan dalam menumbuhkembangkan pemikiran Islam di daerah mereka ketika kembali ke Hindia Belanda. Posisi para pelajar -yang kemudian berhaji- dianggap lebih berbahaya dibandingkan dengan para haji maupun media massa yang cenderung lebih mudah untuk dikendalikan.

Atas dasar inilah Snouck Hourgronje kemudian senantiasa menyampaikan informasi kepada pemerintah kolonial Belanda bahwa terdapat usaha gerakan Pan-Islam untuk membujuk raja-raja dan pembesar-pembesar Hindia Belanda (kaum Muslim) untuk datang ke Istana Sultan Abdul Hamid II di Istanbul. Tujuan jangka pendek yang ingin dicapainya di Batavia, lanjut Snouck, adalah mendapatkan persamaan status orang-orang Arab dan kemudian untuk semua orang Islam agar sederajat dengan orang-orang Eropa. Jika tujuan sudah tercapai maka orang-orang Islam tidak sukar lagi mendapat kedudukan yang lebih tinggi dari orang Eropa. Namun, upaya ini dapat dikatakan tidak berjalan dengan baik mengingat kurang seriusnya upaya yang dilakukan Abdul Hamid II dalam mengajak para pembesar pribumi di Hindia Belanda.⁷⁸

⁷⁸ E. Gobee dan C. Andriaans, *Nasehat-nasehat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936* (terj: Sukarsih), (Jakarta: INIS, 1994), h. 1691. Walau begitu, tujuan ini tidak tercapai. Sultan Abdul Hamid II lebih memfokuskan kebijakannya terhadap para raja dan pembesar di Hindia Belanda dalam rangka mengumpulkan dana untuk membangun rel kereta Hijaz dalam rangka mempermudah mobilisasi ibadah haji. Tidak terdapat laporan bahwa aktivitas ini berkaitan dengan upaya perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Lihat, Martin van Bruinessen, *Muslim of the Dutch East Indies and The Caliphate Question*, h. 116.

Upaya lain Sultan Abdul Hamid II dalam rangka menyebarkan pengaruh Pan-Islam berlanjut dengan membagi-bagikan *mushaf* Al-qur'an atas nama sultan, dan pencetakan karya-karya teologi Islam dalam bahasa Melayu yang dicetak di Istanbul. Pembagian ini dilakukan oleh para konsul Turki di beberapa daerah di Hindia Belanda. Di antara kitab tersebut adalah tafsir Al-qur'an yang di halaman judulnya menyebut "Sultan Turki Raja semua orang Islam".⁷⁹ Istilah Raja di sini dapat mengacu pada kata *al-Malik* yang berarti penguasa, dan semua orang Islam mengacu pada istilah Muslimin. Jadi, sebutan tersebut nampaknya menunjukkan deklarasi dari Abdul Hamid II bahwa beliau adalah penguasa kaum Muslim sedunia.

Abdul Hamid II ingin mempropagandakan dengan menanamkan sugesti penting melalui kitab suci Al-qur'an sebagai pelindung bagi umat Islam di seluruh dunia. Penggunaan Al-qur'an menjadi penting, mengingat Al-qur'an merupakan kitab suci utama yang -kemungkinan besar- banyak dimiliki oleh umat Islam. Propaganda ini menjadi penting dilakukan sebagai upaya mencari dukungan, mengingat posisi Abdul Hamid II sendiri yang telah goyah dari banyaknya masalah yang menimpa Turki Utsmani. Maka menjadi jelas pula bahwa tujuan propaganda yang dilakukan lebih bernilai jangka pendek yaitu untuk mencapai tujuan politis-taktis.

Walhasil, propaganda Pan-Islam dari Sultan Abdul Hamid II ini memiliki dampak pula pada masyarakat Muslim Hindia Belanda. Selain itu, propaganda ini

⁷⁹ Tercatat hingga tahun 1904 telah ada 7 sampai 8 konsul (utusan) yang pernah ditempatkan Turki Utsmani di Hindia Belanda. Terutama sekali konsul Turki yang ada di Batavia yang terlibat aktif dalam pembagian mushaf ini. Konsul Turki di Batavia ini juga sering menggalakkan semangat Pan-Islam walau selalu dibatasi dengan keras. Lihat, E. Gobee dan C. Andriaans, *Nasehat-nasehat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936*, h. 1740. Juga lihat, Husnul Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, h. 203.

juga dilakukan bertepatan dengan upaya pemerintah kolonial Belanda yang mulai membangun pola pemerintahan yang efektif atas kepulauan Hindia Belanda. Umat Islam Hindia Belanda juga menghubungkan Pan-Islam dengan sosok Abdul Hamid II, dimana Abdul Hamid dianggap sebagai penguasa Muslim yang kuat yang masih tersisa dalam suatu negara (Islam) dan bukan sebagai khalifah dari beragam pemeluk agama (Islam).⁸⁰ Dalam konteks ini, Turki Utsmani menggunakan Pan-Islam sebagai gagasan mempersatukan umat Islam seluruh dunia. Gagasan ini kemudian mampu menarik perhatian umat Islam dari berbagai belahan dunia yang mengalami penjajahan Barat, termasuk pula di Hindia Belanda. Berangkat dari hal ini maka dapat disimpulkan bahwa propaganda Pan-Islam yang dilakukan oleh Abdul Hamid II pada dasarnya lebih bersifat politis dan bukan dalam konteks spiritual, walau dalam perkembangan selanjutnya arah dari wacana Pan-Islam mulai diperlunak dan dibatasi pada semangat *ukhuwah* (spiritual) Islam.

Karena bersifat politis, maka pemerintah kolonial Hindia Belanda merespon wacana Pan-Islam ini dengan keras. Bagi pemerintah kolonial, menentang semangat Pan-Islam merupakan prinsip yang harus dipegang teguh. Untuk itu, Snouck Hurgronje sebagai penasihat masalah Islam bagi pemerintah kolonial memberikan rekomendasi bahwa pemerintah tidak perlu takut mengambil kebijakan yang didasarkan pada kepentingannya sendiri dan kepentingan

⁸⁰ Lihat, Martin van Bruinessen, *Muslim of the Dutch East Indies and The Caliphate Question*, h. 116. Ketika Turki Utsmani mengalami banyak kekalahan dalam beberapa perang, Sultan Abdul Hamid II pernah menyatakan, "*Kita wajib menguatkan ikatan kita dengan kaum Muslim di belahan bumi yang lain. Kita wajib saling mendekat dan merapat dalam intensitas yang sangat kuat. Sebab, tidak ada harapan lagi di masa depan kecuali dengan kesatuan ini.*" Inilah gagasan yang kelak dikenal sebagai Pan-Islam. Lihat, Hamid Al-Gadri, *Islam dan Keturunan Arab dalam Pemberontakan Melawan Belanda*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 132. Dalam konteks demikian, maka seruan Pan-Islam yang dipropagandakan Abdul Hamid II lebih terasa aspek politisnya ketimbang aspek spiritualnya/teologis.

penduduknya. Dalam konteks ini, maka saluran haji menjadi prioritas pertama pemerintah dalam melakukan kontrol ketat, terutama kepada para mukimin, dan juga orang Arab yang menetap di Hindia Belanda.⁸¹ Kedua unsur ini dianggap pemerintah kolonial sebagai unsur yang dapat menumbuhkan suburkan Pan-Islam di Hindia Belanda.⁸² Selain itu, Snouck Hurgronje juga memberikan perhatian khusus pribadi-pribadi khusus (non-pribumi) yang berkaitan langsung dengan keberadaan Konsul Turki di Hindia Belanda.⁸³

Walaupun pemerintah kolonial merespon Pan-Islam dengan sangat keras, namun hubungan diplomatik antara Turki dan Belanda tidaklah putus satu sama lain. Masing-masing negara bahkan saling menempatkan konsul masing-masing di antara kedua negara. Tercatat paling tidak pada 1904, pemerintah Turki

⁸¹ Di Hindia Belanda pengaruh gerakan Pan-Islam terhadap masyarakat Arab mendapat respon yang sangat baik, ditandai dengan banyaknya masyarakat Arab yang mengikuti seruan tersebut. Mereka percaya gerakan ini akan menyamakan derajat orang Arab dengan Eropa sebagaimana yang dijanjikan oleh utusan dari pemerintahan Turki saat itu. Derasnya informasi tentang gerakan Pan-Islam dalam berbagai surat kabar berbahasa Arab seperti *Ma'umat* dan *al-Muayyad* membuat masyarakat Arab sadar akan situasi dan keadaan yang terjadi di sekelilingnya. Belum lagi proses asimilasi keturunan Arab dengan masyarakat pribumi dan perlawanan pejuang dari masyarakat Arab di berbagai daerah, semuanya memaksa pemerintah kolonial Belanda untuk menerapkan peraturan yang membatasi ruang lingkup kegiatan masyarakat Arab di Hindia Belanda. Di antara peraturan yang diterapkan adalah Belanda melarang imigrasi masyarakat Arab dari Hadramaut. Menurut Belanda, Arab Hadramaut baru berbahaya bagi pemerintahannya kalau mereka sudah berada di Hindia Belanda. Belanda sangat mempersulit imigrasi mereka ke Hindia Belanda dengan berbagai peraturan yang menyulitkan imigrasi, misalnya untuk mendapat tiket kapal ke Hindia Belanda, dan setelah sampai di Hindia Belanda, untuk turun dari kapal dan setelah mereka sampai di tempat tujuan, sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan izin menetap. Mereka hanya dapat berdiam di kota tertentu dan hanya boleh bertempat tinggal di bagian tertentu dari kota itu. Untuk bepergian, mereka harus meminta izin (pas), tidak saja dari satu kota ke kota yang lain, tetapi sering kali juga dari satu bagian kota ke bagian kota yang lain. Untuk mengatasi segala kesulitan ini, tidak jarang mereka diperlakukan dengan cara kasar dan dihina oleh pejabat pemerintah kolonial Belanda di masa itu. Gerakan Pan-Islam semakin bertambah pengaruhnya dengan bantuan masyarakat Arab, sehingga pemerintah kolonial Belanda merasa gerakan itu akan membahayakan pemerintahannya. Selanjutnya pada awal tahun 1900, peraturan pembatasan izin menetap dan kewajiban melengkapi diri dengan surat jalan (*wijken en passen stelsel*) dihapus, masyarakat Arab terus menumpukkan harapannya pada pemerintahan Turki. Agitasi Pan-Islam yang sejak bertahun-tahun telah nampak di mana-mana, mendapat respon yang luar biasa kuatnya di negeri ini. Banyak masyarakat Arab terkemuka di Betawi yang mengirimkan anak-anaknya belajar ke Turki. Tidak ada diantara bangsa Arab yang menentang Pan Islam, meskipun sebagian di antara mereka tidak banyak melihat untungnya. *Ibid*, 143-149.

⁸² Husnul Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, h. 96-97.

⁸³ Alwi Shahab, *Maria van Engels: Menantu Habib Kwitang*, (Jakarta: Penerbit Republika, 2006), h. 120-122.

Utsmani telah memiliki 7 hingga 8 konsul di seluruh kawasan Hindia Belanda.⁸⁴

Hal ini menandakan bahwa, walaupun gagasan Pan-Islam juga turut disebarkan oleh Turki, namun pemerintah kolonial Belanda masih memiliki pertimbangan politis dengan tetap menjalin hubungan dengan Turki Utsmani. Fokus kebijakan kemudian hanyalah pengawasan ketat terhadap aktivitas konsul Turki, terutama yang berkaitan dengan penyebaran Pan-Islam. Pemerintah kolonial Belanda nampaknya masih merasa “segan” dengan posisi Turki Utsmani dalam kaitannya sebagai khalifah bagi umat Islam di Dunia.⁸⁵

Di sisi yang lain, saluran media massa yang memuat propaganda politik Islam secara umum⁸⁶ dan Pan-Islam secara khusus di Hindia Belanda tidak terlalu

⁸⁴ Konsul pertama di Batavia didirikan pada tahun 1883. Konsul ini dibuka sebagai respon dari surat yang dikirimkan umat Islam Hindia Belanda kepada Turki Utsmani dengan isi berupa permohonan untuk dapat membebaskan mereka dari penjajahan Belanda. Namun begitu, pemerintah Turki tidak dapat memenuhinya dan hanya dapat membantu dengan cara membuka perwakilan/konsul di Batavia. Rashed Chowdhury, *Pan-Islamism and Modernisation During The Reign of Sultan Abdul Hamid II, 1876-1909*, h. 246.

⁸⁵ Rasa segan ini diperkirakan muncul dari wibawa Sultan Abdul Hamid II yang masih dihormati di kancah internasional. Walaupun kondisi Turki Utsmani pada masa pemerintahannya telah dijuluki *The Sickman From Europe*, namun negara-negara Eropa lain masih menyeganiya. Hal ini terlihat dari suatu peristiwa dimana pernah ada rencana pementasan teater yang diadaptasi dari karya Voltaire yang akan diadakan di kota Paris, Perancis. Drama itu bertema “Muhammad atau Kefanatikan” yang isinya mencaci Rasulullah. Begitu mengetahui berita tentang rencana pementasan tersebut, Sultan Abdul Hamid II memperingatkan pemerintah Perancis melalui duta besarnya di Paris agar menghentikan pementasan drama itu dan mengingatkan akan dampak politik yang bakal dihadapi Perancis jika pementasan tersebut nekat dilanjutkan. Perancis pun serta-merta membatalkannya. Grup teater itu pun datang ke Inggris untuk melanjutkan pementasan serupa dan sekali lagi Sultan memperingatkan Inggris. Kali ini Inggris menolak peringatan tersebut dengan alasan tiket-tiket telah dijual dan pembatalan drama bertentangan dengan prinsip kebebasan rakyatnya. Perwakilan Turki Utsmani di Inggris pun menyatakan ke Pemerintah Inggris bahwa meskipun Perancis mempraktikkan “kebebasan”, tetapi mereka telah melarang pementasan drama tersebut. Namun, Inggris berkilah bahwa kebebasan yang dinikmati oleh rakyatnya jauh lebih baik dari apa yang dinikmati oleh Perancis. Begitu mendengar jawaban itu, Sultan Abdul Hamid II sekali lagi memperingatkan dengan mengeluarkan peringatan: “Saya akan mengeluarkan perintah kepada umat Islam dengan menyatakan bahwa Inggris sedang menyerang dan menghina Rasulullah kami!. Saya akan menyatakan *Jihad fisabilillah* (perang)”. Pasca ultimatum ini, Inggris pun membatalkan pementasan drama tersebut. Lihat, Muhammad Harb, *Catatan Harian Sultan Abdul Hamid*, h. 35-37. Seruan jihad ini jugalah yang nampaknya membuat Belanda berpikir tentang posisinya dengan Turki Utsmani, walau kemudian kekhawatiran pemerintah Belanda ini ternyata berlebihan/tidak terbukti. Selain itu juga terkait dengan, kewibawaan Sultan Abdul Hamid II juga dapat dilihat dari peristiwa penolakan Turki terhadap berdirinya negara Yahudi, walaupun Turki Utsmani telah dalam kondisi terpuruk, terutama secara ekonomi. Lihat, Adian Husaini, *Wajah Peradaban Barat...*, h. 67-70.

⁸⁶ Begitu menjamurnya surat kabar, namun tak satu pun yang membawa Islam sebagai benderanya. Barulah pada tahun 1906, selepas pulang dari Kairo, Syekh Tahir Jalaluddin menerbitkan *Al Imam* di Singapura. Bersama Syekh Al-Hadi (Singapura), serta Haji Abbas bin Muhammad Taha (Aceh) merintis *Al Imam* menjadi media massa Islam pertama di tanah Melayu-Nusantara. Tentu saja saat itu belum ada negara

diperhatikan dengan serius oleh pemerintah kolonial Belanda.⁸⁷ Hal ini dapat dilihat dimana di awal abad ke-20 M dimana usaha penerbitan media massa dengan beragam varian justru tumbuh subur, termasuk media massa yang mengkritik keras pemerintah kolonial. Walau kemudian, di pertengahan abad ke-20 M pemerintah kolonial kemudian menseriusi kontrol terhadap media massa, namun saluran media massa sudah terlanjur tidak dapat dibendung lagi oleh pemerintah kolonial. Di sisi yang lain, saluran pelajar yang menempuh pendidikan di Turki juga tidak diberikan perhatian lebih oleh pemerintah Hindia Belanda mengingat jumlah pelajar tidak sebanyak jumlah para haji.

Dalam perkembangannya kemudian, Pan-Islam oleh umat Islam Hindia Belanda tidak selalu diidentikkan dengan para jamaah haji, baik yang mukim maupun tidak. Juga tidak dengan adanya satu media tertentu. Wacana Pan-Islam kemudian masih (selalu) diasosiasikan dengan keberadaan (kekhilafahan) Turki

bernama Indonesia, Singapura ataupun Malaysia. Yang ada ialah wilayah-wilayah yang dijajah oleh Inggris dan Belanda. *Al Imam* mampu menerobos batas-batas kolonial itu, hingga mampu menciptakan bayangan akan sebuah komunitas bernama bangsa melayu. Sebuah bayangan yang mampu untuk menembus sekat-sekat wilayah yang diciptakan penjajah dan mengikat bangsa Melayu menjadi satu dalam ikatan agama Islam. Pernyataan itu di tandai oleh *Al Imam* dengan pemakaian istilah *Umat Timur*, *Umat Melayu*, *Umat Kita sebelah sini*, *Umat Islam kita di sini*, oleh *Al Imam* untuk menyebut bangsa Melayu. Melalui media massa cetak pula, *Al Imam* membuka pintu pembelajaran bagi umat Islam, yang biasanya hanya di lakukan di pesantren. Hal ini turut melepas monopoli ulama tradisional di Pesantren sebagai satu-satunya pemegang otoritas keilmuan. Dan yang terpenting *Al Imam* membawa budaya baru bagi umat Islam di Melayu dan Hindia Belanda, yaitu budaya cetak. Kemajuan inilah yang akhirnya membuka pintu lahirnya pers Islam lainnya di Indonesia. Jejak *Al Imam* meresap begitu mendalam bagi umat Islam di Hindia Belanda, hingga tahun 1911 di Sumatera Barat terbitlah sebuah majalah bernama *Al Munir*. Pada praktiknya, *Al Munir* tidak hanya bersuara keras terhadap praktik *bid'ah*, tetapi juga pada pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Kritik-kritik keras terhadap pemerintah kolonial membuat mereka mendapatkan tekanan dan pengawasan dari pemerintah kolonial saat itu, walau tidak sampai mengalami pembreidelan/pelarangan. *Al Munir* pun kerap bersuara mengenai kemerdekaan bangsa di Hindia Belanda. Namun ketatnya pengawasan pemerintah kolonial, membuat mereka menyampaikannya secara hati-hati dan terselubung, misalnya dengan membahas kemerdekaan Turki, Mesir dan India dari jeratan penjajah. Bahkan ketika membahas suatu tulisan tentang ilmu pengetahuan-pun, ujungnya akan membahas bagaimana mencapai kemerdekaan. Kemunculan dua media massa Islam ini turut pula menjadi penyemai bagi munculnya media massa lain yang juga bercorak Islam politik. Beggy Rizkiyansyah, "Lahirnya Pers Islam di Indonesia", h. 2-4.

⁸⁷ Dipertengahan tahun 1920-an, terbit -paling tidak- 2 media massa yang mendasari dirinya serta fokus pada perjuangan Pan-Islam dan khilafah di Hindia Belanda. keduanya yaitu surat kabar *Bandera Islam* dan *Fadjar Asia*. Namun begitu, munculnya kedua media ini, juga tidak terlalu dianggap sebagai ancaman serius bagi pemerintah kolonial (akan diulas dalam bab selanjutnya).

Utsmani secara umum dan tidak secara khusus pada sultan Abdul Hamid II. Meskipun demikian, Pan-Islam yang diupayakan oleh Turki Utsmani tidak membawa hasil yang diharapkan, kecuali dalam rangka untuk menutupi ketimpangan yang ada di Turki Utsmani. Secara konkret, bukti keberhasilan Pan-Islam yang diperjuangkan oleh para tokoh pembaharu pada saat itu juga sulit untuk ditunjukkan. Namun begitu, Pan-Islam mampu memberikan pengaruh yang luas yang dijadikan sebagai sumber inspirasi dan simbol loyalitas yang mendorong perjuangan bagi terciptanya solidaritas umat ketika terjadinya krisis.

Pada awal abad ke-20 M umat Islam di Hindia Belanda memandang Turki Utsmani sebagai perwujudan dari Khilafah Islamiyah. Mereka telah tertarik mengikuti perkembangan Turki Utsmani sejak negara ini terlibat dalam Perang Dunia I⁸⁸ sampai kemudian sistem khilafah di Turki diruntuhkan dan muncul gagasan untuk penegakan khilafah yang baru. Dalam hal ini, umat Islam di Hindia Belanda saat itu bukan saja berminat dalam masalah ini, bahkan merasa berkewajiban memperbincangkan dan menyelesaikannya.⁸⁹ Pandangan ini, sekali lagi tidak terlepas dari identiknya konsep Pan-Islam dan Khilafah.

⁸⁸ Latar Belakang Turki Utsmani terlibat dalam Perang Dunia I antara lain disebabkan oleh permusuhan dengan Rusia. Rusia sudah lama berambisi untuk melumpuhkan Turki Utsmani, bahkan dalam Perang Balkan, Turki Utsmani kehilangan banyak wilayah yang menyebabkan Turki Utsmani ingin membalas dendam terhadap Rusia. Sebab yang lain adalah persahabatannya dengan Jerman, serta keinginan pemerintah Turki Utsmani mengembalikan kejayaannya. "Persahabatan" dengan Jerman dalam menjalin aliansi terjadi ketika terdapat kesepakatan antara pemerintah Turki Utsmani yang diwakili sekelompok kecil para pemimpin Turki Muda, yang ditandatangani secara sangat rahasia pada tanggal 2 Agustus 1914. Keterlibatan Turki Utsmani pada Perang Dunia I juga merupakan puncak dari beragam traktat perjanjian yang memaksa Turki untuk turut serta didalam Perang Dunia I. Ulasan lengkap dapat dilihat, Lord Eversley, *The Turkish Empire: Its Growth and Decay*, (New York: Dodd Mead and Company, 1917), h. 352-368.

⁸⁹ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, h. 242. Keidentikan antara Pan-Islam dan jabatan khalifah dapat dilacak dari diembannya jabatan khalifah oleh Sultan Turki, dimana Salim I sebagai Sultan Turki Utsmani berhasil merebut Mesir dan menggulingkan khalifah Abbasiyah terakhir. Sampai disini kemudian Salim I mengangkat diri sebagai khalifah serta pelindung Mekah dan Madinah. Sejak abad ke-18 M konsep khalifah ini digunakan persis dengan konsep kepausan dalam Kristen. Hingga awal abad ke-20 M, gelar sultan atau khalifah selalu digunakan oleh para pemimpin Turki Utsmani yang memiliki kekuasaan/wewenang untuk mengatur urusan duniawi dan rohani. Husnul Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, h. 79. Lihat pula, Anthony Reid, *The Ottomans in Southeast Asia*, dalam *Asia Research*

Keterlibatan Turki Utsmani dalam Perang Dunia I sendiri tidak menyurutkan perhatian kaum muslim di Hindia Belanda, terutama pada tahun 1921-1922 M, dimana pasukan nasional Turki berhasil memukul mundur pasukan Yunani. Peristiwa ini juga didukung dengan berbagai kemenangan-kemenangan lain Turki, di bawah pimpinan nasionalis Turki yaitu Mustafa Kemal Attaturk. Kemenangan-kemenangan ini kemudian disambut sukacita oleh dunia Islam, termasuk di Hindia Belanda karena kemenangan itu dianggap sebagai kemenangan dunia Islam melawan kekuatan penjajah. Hal ini dilatarbelakangi anggapan bahwa, tema perang yang dilancarkan oleh Mustafa Kemal adalah tema khas perjuangan Islam seperti Jihad.⁹⁰ Ditengah seruan dan propaganda kepada rakyat, Mustafa Kemal juga menyatakan bahwa perjuangannya melawan para penjajah yang memasuki Turki adalah demi menjaga institusi khilafah dan pranata serta lembaga Islam yang lain.

Institute Working Paper Series, No. 36, February 2005, h. 10. Namun secara politis, Sultan Abdul Hamid II lah yang menjadikan gelar khalifah -bagi Sultan Turki- masuk dalam konstitusi negara Turki Utsmani secara legal formal. Namun hal ini dilatarbelakangi dengan kesalahpahaman pandangan orang-orang Eropa dengan istilah khalifah yang dipahami hanya sebagai kekuasaan rohani semata (kepausan). Pada akhirnya, Abdul Majid II membangkitkan kembali posisi khalifah juga tidak lepas dari latar belakang historisnya, terutama kondisi terpuruk Turki Utsmani ketika mengalami konflik berkepanjangan dengan negara-negara Eropa, terutama Rusia. Lebih jauh lihat, Thomas W. Arnold, *The Caliphate*, (London: Oxford University Press, 1924), h. 173. Ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa isu kekhalifahan di Indonesia sebenarnya tidak terlalu mengakar kuat, mengingat memori masyarakat Indonesia lebih tertuju pada bentuk kerajaan (Islam)/kesultanan. Lebih jauh lihat, Abdul Aziz, *Chiefdom Madinah: Salah Paham Negara Islam*, h. 108. Diskursus konsepsi khilafah -apakah termasuk penguasa politik atau spiritual atau keduanya- secara lengkap dapat lihat, Reza Pankhurst, *The Inevitable Caliphate? A History of The Struggle for Global Islamic Union, 1924 to The Present*, (New York: Oxford University Press, 2013), h. 31-62.

⁹⁰ Perang suci (*jihad*) -dalam kaitannya dengan PD I- sendiri dideklarasikan secara resmi oleh Sultan Mehmed Reshad -pengganti Abdul Hamid II- selaku khalifah Turki Utsmani setelah bermusyawarah dengan para *Syaikhul* Islam Turki Utsmani pada tanggal 14 November 1914. Deklarasi jihad dalam kaitannya dengan kepentingan Perang Dunia I, diserukan terutama sekali terkait dengan hubungan Turki dengan Jerman. Jerman mengharapkan dengan dideklarasikannya seruan jihad ini, bisa memantik perjuangan umat Islam di kawasan jajahan negara yang menjadi musuh dari pihak Turki, terutama daerah Asia Tengah yang menjadi kawasan jajahan Rusia. Pun begitu, seruan jihad ini ternyata tidak cukup berdampak luas terhadap jalannya Perang Dunia I. Lord Eversley, *The Turkish Empire: Its Growth and Decay*, h. 330-331. Dalam kaitannya dengan umat Islam Hindia Belanda, seruan jihad ini terbit di Istanbul melalui sebuah selebaran/pamflet berbahasa Arab, dengan seruan untuk bangkit melawan penguasa “kafir” Belanda. Pun begitu, seruan ini tidak ditindaklanjuti dengan adanya suatu perlawanan selama rentang waktu Perang Dunia I. Martin van Bruinessen, *Muslim of the Dutch East Indies and The Caliphate Question*, h. 117. Lihat pula, Husnul Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, h. 81-82.

Rangkaian peristiwa ini menjadikan citra Mustafa Kemal di Hindia Belanda menjadi positif. Mustafa Kemal dianggap sebagai pahlawan Islam yang dihormati karena telah mempertahankan wilayah Turki dari pendudukan sekutu.⁹¹ Hal ini sebagaimana kutipan berikut,

..... mendengar oearaian tentang peperangan balatentara jang dikepalai oleh pahlawan Islam Moestafa Kemala Pasja ditanah Soeria (Azia Ketjil), dengan maksoed menoentoet kembali djadjahan dan daerah keradjaan Turkey, jaitoe bagian Dar-al-Islam jang tadinja dengan nasib berperangan telah djatoeh kepada pihak lain, melahirkan sjoekoer dan soeka tjita atas rachmat dan nasr jang ditoendjoekkan oleh Toehan atas pasoekan Islam dengan pahlawannja itoe.⁹²

Kemenangan ini ditindaklanjuti dengan pengiriman ucapan selamat yang dilakukan oleh para tokoh Islam Hindia Belanda kepadanya.⁹³ Namun begitu, citra Mustafa Kemal kemudian luntur dengan sendirinya setelah ia naik menjadi kepala negara Turki dan menghapus lembaga khilafah pada tanggal 3 Maret 1924. Mustafa Kemal juga menghapus segala hal yang berbau Islam, seperti peradilan agama, imam dan muadzin yang merupakan kelengkapan negara dan puncaknya menghapus pula kedudukan Islam sebagai agama resmi. Karena itu, dapat

⁹¹ Selain digelar pahlawan Islam, Mustafa Kemal, oleh para elit muslim Hindia Belanda juga digelar pedang Islam dan pembaharu kekhalifahan (*sayf al-Islam wa mujaddid al-khilafa*). Bahkan beberapa pihak di Hindia Belanda membuat pernak-pernik -dalam hal ini gambar dan bahkan jam tangan- dengan memakai nama Mustafa Kemal. Dalam lingkup pribadi, umat Islam Hindia Belanda, yang diwakili golongan pembaharu dan tradisionalis bahkan menganggap tinggi Mustafa Kemal, dalam rentang 1922-1923. Hal ini dapat dilihat dari sikap umat Islam Hindia Belanda yang mengabaikan istri Mustafa Kemal yang tidak mengenakan kerudung menutupi kepalanya, padahal umat Islam Hindia Belanda memahami bahwa penggunaan kain kerudung menutupi kepala adalah suatu kewajiban. Dalam konteks yang lebih luas, beberapa kemenangan bangsa Asia, seperti kemenangan Jepang atas Rusia juga diklaim oleh umat Islam Hindia Belanda sebagai kemenangan Islam. Lihat, Michael Francis Laffan, *Islamic Nationhood and Colonial Indonesia: The Umma Below The Wind*, h. 210-211.

⁹² *Neratja*, 4 November 1922.

⁹³ Umat Islam Hindia Belanda kemudian mengirimkan mosi kepada Mustafa Kemal atas keberhasilannya memenangkan perang. Pengiriman mosi ini menjadi agenda “dadakan” yang tidak direncanakan dan disepakati secara aklamasi ketika umat Islam Hindia Belanda sedang mengadakan kongres al-Islam pertama di Cirebon. Agenda pengiriman mosi ini sendiri tidak terlepas dari peran H. Agus Salim dalam Sarekat Islam. Lebih jauh lihat, Wardini Akhmad, *Kongres Al-Islam 1922-1941...*, h. 113-115. Berangkat dari hal ini maka peristiwa kemenangan Turki ini juga disangkutpautkan dengan ide Pan-Islam. Dengan begitu maka, umat Islam Hindia Belanda tidak dapat lepas dalam melihat kemenangan ini melalui kacamata Pan-Islam.

dikatakan bahwa Mustafa Kemal telah menjadikan Turki -pada 10 April 1928- sebagai negara yang menganut paham sekular.⁹⁴ Dengan demikian, setelah peristiwa penghapusan lembaga khilafah, umat Islam Hindia Belanda lebih memfokuskan diri pada upaya revitalisasi lembaga kekhilafahan ini.⁹⁵

⁹⁴ Dititik ini perubahan sikap terhadap Mustafa Kemal juga terjadi di Hindia Belanda. Secara umum, hal ini terjadi karena kurangnya informasi yang detail mengenai Mustafa Kemal dan program kerjanya atas Turki yang masuk ke Hindia Belanda. *Ibid*, 119.

⁹⁵ *Ibid*, 84-86.